

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH
PENDUDUK, UMUR PEMERINTAH DAERAH, DAN
TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH TERHADAP
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH**



SKRIPSI

Oleh:

Dynda Agustina Tiara Putri

19312486

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH
PENDUDUK, UMUR PEMERINTAH DAERAH, DAN
TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH TERHADAP
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia (UII)

Oleh:

Dynda Agustina Tiara Putri

19312486

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Penulis



(Dynda Agustina Tiara Putri)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH
PENDUDUK, UMUR PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT
PENDIDIKAN KEPALA DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:

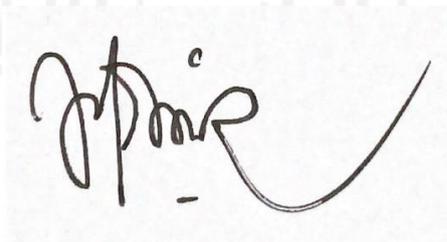
Dynda Agustina Tiara Putri

19312486

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 27 Januari 2023

Dosen Pembimbing



(Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah Daerah, dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Disusun oleh : DYNDA AGUSTINA TIARA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 19312486

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 08 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra, CertIPSAS.

HALAMAN MOTTO

“Do your best in everything and and make the most of what you have got.”

“Bertaqwalah kepada Allah maka Dia akan membimbingmu.Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.”

(QS Al- Baqarah: 282)

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.”

(QS- Al Ar-Rad: 11)

“Maka sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan.”

(QS Al- Insyirah: 5)

المعهد الإسلامي
الاستدرا الأندلسي

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah dan karunia-Nya serta diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, UMUR PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini disusun tidak lepas dari bimbingan, bantuan, do'a dari berbagai pihak sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melewati hambatan dan tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan mendapatkan kemudahan serta kelancaran.
2. Orang tua penulis yang tercinta dan penulis hormati: Bapak **Bedjan** dan Ibu **Suyati** yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Keluarga kakak penulis **Eni Susilowati, Sarbani, dan Aysila Syafiqah Elbany** yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Bapak **Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFA.** selaku dosen pembimbing penulis sekaligus Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. **Vera Dwi Nurcahyani** selaku teman dari penulis sejak SMA hingga sekarang yang selalu mengajak olahraga ketika penulis bosan di kos-kosan.
6. **Fitri Dwi Astuti** dan **Cindy Pramudea Sari** selaku anggota grup “Wonder Women” teman dalam kondisi apapun saat perkuliahan yang memberi bantuan dan menemani penulis.
7. Teman-teman grup seperbimbingan dari Pak Johan yang telah berdiskusi bersama ketika penulis bingung mengenai skripsi.
8. Seluruh pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terkait penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah mendukung secara materi maupun non materi dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kesalahan dari penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

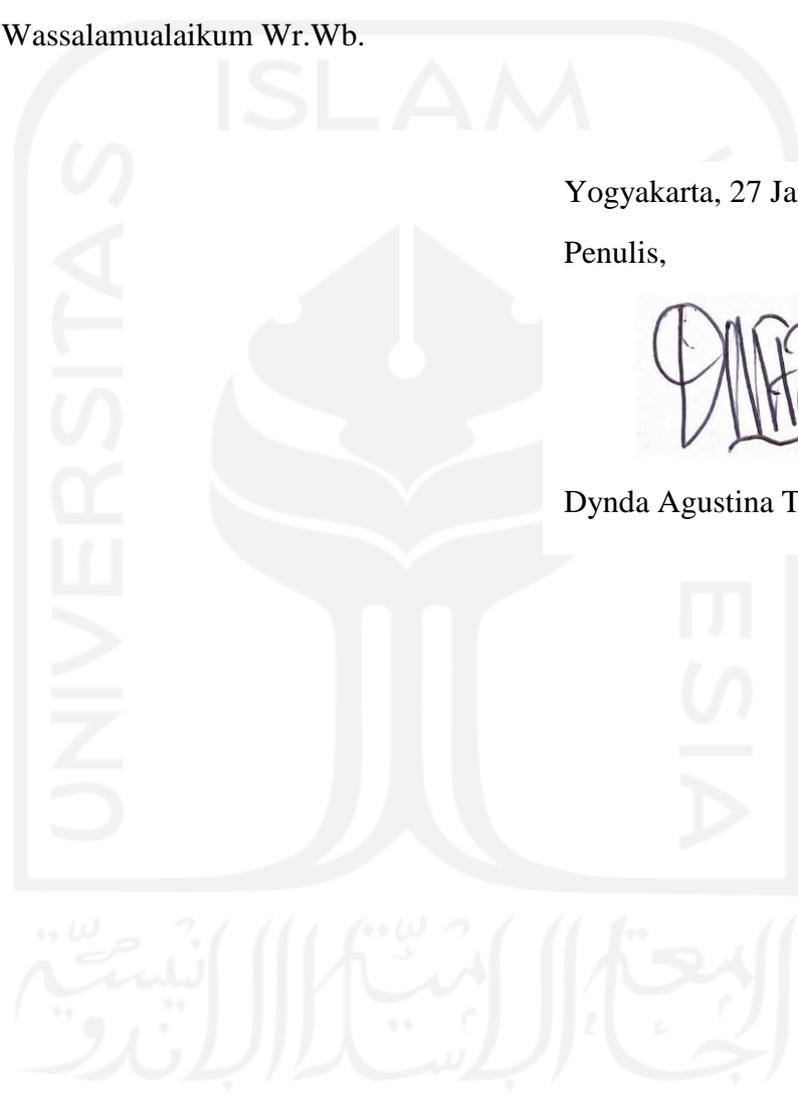
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Penulis,



Dynda Agustina Tiara Putri



DAFTAR ISI

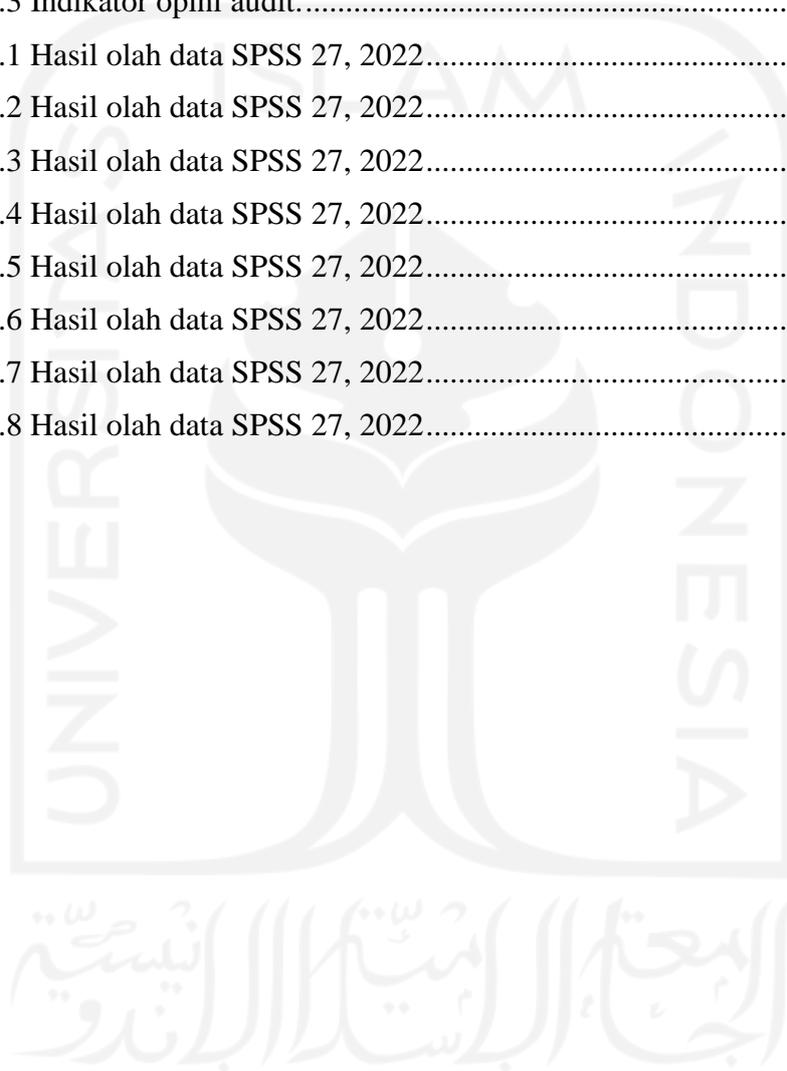
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Institusional Isomorphism	11
2.2 Good Governance	14
2.3 Transparansi	15
2.4 Informasi Publik	17
2.5 Ukuran Pemerintah Daerah	18
2.6 Jumlah Penduduk	19
2.7 Umur Pemerintah Daerah	19
2.8 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	20

2.9	Penelitian Terdahulu.....	21
2.12	Hipotesis Penelitian	26
2.12.1	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	26
2.12.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah.....	27
2.12.3	Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	28
2.12.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah.....	30
2.13	Kerangka Pemikiran	31
BAB III.....		32
METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Metodologi Penelitian.....	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.2.1	Populasi	32
3.2.1	Sampel	33
3.3	Deskripsi Objek Penelitian	34
3.4	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	36
3.5.1	Variabel Dependen.....	36
3.5.2	Variabel Independen.....	37
3.5.3	Variabel Kontrol	40
3.6	Model dan Alat Analisis Penelitian.....	41
3.7	Statistik Deskriptif	42
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.8.1	Uji Normalitas	43
3.8.2	Uji Multikolinieritas	43
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	43
3.9	Uji Regresi Linier Berganda	44
3.10	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	45
3.11	Uji Hipotesis.....	45
3.11.1	Uji Signifikansi Parsial (T).....	46

BAB IV	47
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Analisis Deskriptif	47
4.2 Analisis Uji Asumsi Klasik	49
4.2.1 Uji Normalitas	50
4.2.2 Uji Multikolinieritas	51
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.5 Uji Hipotesis	57
4.5.1 Uji T	57
4.6 Pembahasan Uji Hipotesis	59
4.6.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	59
4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	61
4.6.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	63
4.6.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah	65
BAB V	68
PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan Penelitian	69
5.3 Implikasi Penelitian	70
5.4 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Indikator transparansi.....	34
Tabel 3.2 Indikator tingkat pendidikan kepala daerah	38
Tabel 3.3 Indikator opini audit.....	39
Tabel 4.1 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	46
Tabel 4.2 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	49
Tabel 4.3 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	50
Tabel 4.4 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	51
Tabel 4.5 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	53
Tabel 4.6 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	55
Tabel 4.7 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	56
Tabel 4.8 Hasil olah data SPSS 27, 2022.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Histogram.....	49
Gambar 4.2 Grafik <i>Normal P-Plot</i>	49
Gambar 4.3 Scatterplot.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Kabupaten dan Kota	76
Lampiran 2	Transparansi	79
Lampiran 3	Ukuran Pemerintah Daerah	83
Lampiran 4	Jumlah Penduduk.....	86
Lampiran 5	Umur Pemerintah Daerah	90
Lampiran 6	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	93
Lampiran 7	Opini Audit.....	96
Lampiran 8	Analisis Statistik Deskriptif.....	99
Lampiran 9	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	101
Lampiran 10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	101
Lampiran 11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square).....	102
Lampiran 12	Hasil Uji Hipotesis (Uji T)	103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2021. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 107 laporan keuangan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Namun, umur pemerintah daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

Kata Kunci: ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, transparansi.

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of local government size, population, age of local government, and education level of regional heads on the transparency of local government public information in Indonesia. This study uses a population of local government financial reports in Indonesia 2021. Samples taken in this study were 107 financial reports using a purposive sampling method. The research results obtained show that the size of the local government and the educational level of the regional head have a positive effect on the transparency of local government public information. However, the age of local government and population do not significantly affect the transparency of local government public information.

Keywords: *size of local government, population, age of local government, level of education of regional heads, transparency.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memaksimalkan kinerja dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendapatkan citra yang baik dari masyarakatnya. Namun, tidak hanya mendapatkan citra yang baik, yang lebih penting ialah bagaimana pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diamanahkan masyarakat kepada pemerintahan. Hal tersebut merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan pelayanan, pemberdayaan, serta yang paling penting adalah peran serta masyarakat (Fauzi, 2019). Masyarakat tentunya menginginkan sistem pemerintahan yang demokratis serta mampu memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Masyarakat berhak menilai kinerja pemerintah daerah melalui asset yang dimiliki, kemudahan dalam pelayanan informasi, keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah tidak terfokus pada mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, namun bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya mampu dirasakan masyarakat.

Banyaknya tuntutan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan dan mengembangkan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah

yang memberikan bentuk pelayanan dan kemudahan aksesibilitas informasi publik terus mengembangkan dan menerapkan fasilitas *e-Government* sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, dan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Hal tersebut sangat berdampak baik terhadap pengelolaan keuangan negara Indonesia sehingga kinerja pemerintahan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah menjalankannya secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan transparansi pemerintahan daerah di Indonesia telah direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut dinyatakan bahwa informasi publik yang diumumkan harus tepat, akurat, dan tidak menyesatkan. Selain itu dalam Pasal 9 ayat 1 undang-undang tersebut juga dijelaskan kewajiban badan publik untuk mengungkapkan informasi publik secara berkala. Informasi yang diumumkan berupa kinerja serta laporan keuangan badan publik. Selain itu keterbukaan informasi publik harus mudah dijangkau dan mudah diakses masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia sangat didukung oleh kecanggihan teknologi digital yaitu dengan melaporkan informasi kepada publik melalui laman resmi pemerintah daerah masing-masing.

Informasi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah keterangan, pernyataan, ide, nilai baik data maupun fakta yang dapat dirasakan lewat pancaindra yang disajikan lewat

media teknologi baik elektronik maupun non elektronik melalui berbagai format. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dimiliki, dan diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang kaitannya dengan kepentingan publik. Berdasarkan pengertian di atas, informasi publik menjadi kebutuhan masyarakat dan pihak lainnya untuk mengawasi, menjalankan, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Banyak informasi publik yang belum bisa diakses dan sulit dalam mendapatkannya juga harus memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi peningkatan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia serta keterbukaan informasi publik mengindikasikan terciptanya negara yang demokratis dan berdaulat guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara dan badan publik. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat mengoptimalkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah yang berkomitmen dengan pengungkapan informasi di situs web pemerintah akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan sumber daya yang dimiliki (Padeiro et al., 2021).

Pentingnya transparansi dalam pemerintah daerah ini adalah hal tersebut dapat mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah yang merugikan negara dan pihak lainnya. Banyak pemerintah daerah yang tidak mengumumkan informasi publik di laman resmi yang menjadi sebuah akses

yang mudah dijangkau masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dari pemerintah daerah.

Masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah daerah berhak menuntut pemanfaatan asset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masyarakat kebanyakan lebih memilih sikap acuh tak acuh terkait kinerja pemerintah daerah hingga tidak tahu menahu soal asset daerah beserta pemanfaatannya. Penelitian sebelumnya oleh Adiputra et al., (2018) menghasilkan temuan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi informasi publik pemerintah daerah. Temuan serupa juga dilakukan pada penelitian Wilopo (2017) dan Harahap et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Wardani et al., (2022) dan Naopal et al., (2017) juga menghasilkan temuan yang serupa bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sementara itu, penelitian oleh Nainggolan & Purwanti (2012) menghasilkan temuan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati & Achmad (2014) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Rasa ingin tahu masyarakat berkaitan dengan informasi publik dan keterbukaan pemanfaatan asset yang dimiliki masih tergolong kurang. Jumlah penduduk di Indonesia yang semakin besar tentunya membutuhkan pelayanan informasi publik yang cukup besar pula sehingga dibutuhkan transparansi informasi

publik. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu informasi dan hanya cenderung diam bersikap pasrah dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al., (2017) menghasilkan temuan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelaporan LKPD yang menandakan bahwa kurang adanya transparansi pemerintah daerah terkait informasi keuangan maupun non keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adi (2019) bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transparansi informasi pemerintah daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan Harahap et al., (2019) menghasilkan temuan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan.

Di Indonesia, terdapat banyak pemerintah daerah yang berdiri sejak lama namun belum melakukan penerapan transparansi yang maksimal, bahkan tidak mengikuti keterbaruan teknologi yang berkembang. Tak sedikit pula pemerintah daerah yang tergolong baru masih melakukan proses penyesuaian terkait sistem pemerintahan yang dijalankan sehingga dalam proses transparansi informasi publik juga belum maksimal.. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan sehingga pemerintah belum transparan terkait pengungkapan informasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto & Indarti (2019) menyatakan bahwa usia resmi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

yang artinya pemerintah melaksanakan tanggungjawab secara transparan kepada publik.

. Tingkat pendidikan kepala daerah menjadi modal bagi kepala daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan ilmu yang dimilikinya. Banyak kepala daerah yang memiliki pendidikan sangat tinggi namun dalam kinerja pemerintahan cenderung kurang, misalnya dalam hal transparansi informasi bahkan hingga terciptanya praktik korupsi. Penelitian yang meneliti variabel tingkat pendidikan daerah dilakukan oleh Pahlevi & Setiawan (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Kepala daerah lebih condong ke prinsip dan lingkungan sosial dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Dengan adanya perbedaan hasil temuan peneliti terdahulu, ditemukan banyak perbedaan yang menyebabkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah Daerah, dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah?

2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah?
3. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah?
4. Apakah tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penafsiran, penelitian ini memiliki pembatasan masalah yaitu hanya terfokus pada faktor-faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah, meliputi ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah
2. Untuk menguji secara empiris apakah pengaruh jumlah penduduk terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah
3. Untuk menguji secara empiris apakah pengaruh umur pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah
4. Untuk menguji secara empiris apakah pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi publik pemerintah daerah di Indonesia dan menjadikan hasil penelitian ini menjadi ilmu yang mampu dipelajari kedepannya.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah guna meningkatkan tingkat keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah melalui transparansi dan kemudahan aksesibilitas pelayanan informasi publik.

4) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi atau bahan literatur untuk penelitian selanjutnya terkait variabel-variabel ataupun cakupan obyek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori terkait transparansi, ukuran pemerintah daerah, teori institusional isomorphism, tingkat pendidikan kepala daerah, opini audit, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, informasi publik, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini serta pembahasan mengenai kesimpulan dari penelitian ini mengenai hasil terbukti atau tidaknya hipotesis dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Institusional Isomorphism

Teori institusional adalah teori kelembagaan yang timbul karena adanya tekanan dari lingkungan institusional pada suatu organisasi hingga terbentuknya institusionalisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Teori ini menguatkan tentang tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan.

Teori institusional didorong oleh tiga gaya isomorfik. Isomorfik adalah suatu tahap yang mendukung atau mendorong organisasi menuju organisasi lain guna mendapatkan kondisi yang sama. Teori institusional isomorphism terdiri dari *coercive*, *mimetic*, dan *normative* yang kemudian dalam suatu organisasi akan selalu berkembang menuju kesetaraan baik dalam konseptual maupun perilaku untuk menyesuaikan diri organisasi (DiMaggio dan Powell, 1983 dalam Struckell et al., 2022). Tekanan *coercive*, *mimetic*, dan *normative* menjadi pilar mekanisme perubahan menuju keselarasan struktur dan berperilaku yang juga dijelaskan oleh (DiMaggio dan Powell, 1983 dalam Valenty & Kusuma, (2019) dan juga Loi et al., (2021). Dari segi perspektif teori institusional, suatu organisasi mendapatkan tekanan atau tuntutan dari pihak eksternal (Zucker, 1987).

Menurut DiMaggio dan Powell (2000) tekanan *coercive* merupakan suatu penyesuaian diri entitas karena mendapatkan tekanan yang lebih kuat dari pihak eksternal. Pihak eksternal dalam konteks perspektif teori institusional ini

kemungkinan berasal dari intitusi yang lebih kuat atau tinggi atau bahkan dengan komunitas yang lebih besar. Pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan penyediaan layanan infrastruktur dan layanan informasi publik karena adanya tuntutan dari masyarakat.

Mimetic identik dengan rasa iri terhadap kesuksesan pihak lain sehingga memicu organisasi memplagiasi proses organisasi memperoleh kesuksesan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan keinginan organisasi agar kinerja lebih efektif. Organisasi yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung mengalami keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang tergolong baru tentunya ingin bersaing dan cenderung meniru bagaimana proses yang dilalui oleh organisasi yang sudah besar.

Normative merupakan keahlian atau profesionalitas dengan menerima tekanan norma-norma atau aturan yang muncul pada aspek tertentu. Tekanan ini timbul akibat adanya tambahan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal yang diterapkan dalam organisasi yang kemudian disebut profesionalisme. Ketika profesionalisme tersebut meningkat maka timbul kepercayaan normatif dalam organisasi tersebut.

Teori institusional ini dari segi pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan diri terhadap tuntutan pihak-pihak eksternal maupun internal. Tuntutan pihak eksternal misalnya *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat adalah yang paling utama melalui penyampaian keterbukaan informasi publik yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk transparansi ini mampu

meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat terhadap semua aktivitas pemerintah.

Teori institusional ini pada dasarnya adalah tekanan atau tuntutan dari lingkup organisasi itu sendiri. Variabel ukuran pemerintah daerah merupakan suatu tekanan *coercive* bagi pemerintah karena variabel ini diukur melalui total asset yang dimiliki pemerintah. Total asset yang dimiliki mencerminkan seberapa besar kekayaan daerah yang dimiliki daerah dalam suatu pemerintahan. Semakin besar total asset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan asset tersebut guna kepentingan publik. Besarnya tuntutan masyarakat dalam pengungkapan informasi publik berkaitan dengan asset yang telah dimiliki dan dimanfaatkan guna melayani kebutuhan masyarakat ini menambah tekanan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah semakin terdorong dalam transparansi informasi publik karena mendapat tekanan dari masyarakat.

Berkaitan dengan variabel jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk dalam suatu wilayah pemerintahan maka semakin besar tuntutan masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Penduduk yang semakin banyak tentunya membutuhkan pelayanan dan informasi yang semakin banyak. Untuk itu pemerintah daerah semakin transparans dalam pelaporan informasi publik.

Dilihat dari teori institusional isomorphism, variabel umur pemerintah daerah mendapatkan tekanan *normative*. Semakin tua umur pemerintahan maka semakin besar pengalaman yang diterima pemerintah daerah berkaitan dengan sistem yang ada di instansi pemerintah. Pemerintah daerah yang lebih telah

berpengalaman tentunya semakin transparan dan akuntabel tentang bagaimana pelaporan informasi publik yang dilakukan pemerintah daerah di situs resminya.

Variabel tingkat pendidikan kepala daerah menjadikan sebuah tekanan *normative* bagi pemerintah daerah. Latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah maka semakin baik pula kinerja kepala daerah dalam mengungkapkan informasi publik mengingat tingginya wawasan kepala daerah karena riwayat pendidikan yang telah dicapai.

2.2 Good Governance

Tujuan suatu pemerintahan tercapai jika memiliki tata kelola yang baik dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya atau aset daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan sistem *good governance* yang baik, maka kinerja dari pemerintah daerah mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat.

Dengan adanya penerapan *good governance* berdampak baik terhadap kualitas pemerintahan terutama praktik korupsi yang semakin berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kondisi rakyatnya (Widanti, 2022). Penerapan pelayanan publik secara *online* dan berbasis web yang semakin meningkat mewujudkan transparansi pemerintahan terkait pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan permintaan informasi dari masyarakat. Pemerintah yang menerapkan tata kelola secara transparan dan akuntabel direspon baik oleh masyarakat karena memberikan informasi secara terbuka terkait pengelolaan

daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dengan mendapat penilaian kinerja dari masyarakat sehingga masyarakat kemungkinan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Terdapat 5 asas *good public governance* yang perlu dilakukan pemerintah daerah yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Kelima asas tersebut adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini diteliti untuk menjalankan asas transparansi, khususnya transparansi informasi keuangan dan non keuangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan terkait informasi yang murah, mudah, dan efisien mampu digunakan oleh pemangku kepentingan (KNKG, 2008). Transparansi ini menjadi sebuah hal penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga mampu mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemanfaatan situs resmi pemerintah daerah.

2.3 Transparansi

Transparansi dalam istilah politik merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan keterbukaan. Transparansi secara harfiah berarti bahwa mampu dipandang secara keseluruhan (Tahir, 2014). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terkait dengan informasi publik terhadap pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi keuangan ataupun non keuangan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pemerintah ini menjadi hal yang harus diawasi oleh DPRD dan masyarakat karena dengan semakin transparan pemerintah daerah berkaitan dengan keterbukaan

informasi publik maka hal tersebut menjadi indikator penentu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan khususnya menghindari praktik korupsi di jajaran pemerintahan. Tingkat korupsi yang meningkat juga disebabkan salah satunya dengan manajemen pemerintah yang tidak transparan.

Transparansi merupakan salah satu dari kelima asas yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah menurut *good public governance*. Di era digital seperti sekarang, transparansi informasi publik menjadi sebuah permintaan masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, kemudahan akses informasi publik salah satunya dapat diterapkan dalam situs resmi pemerintah (Wilopo, 2017). Oleh karena itu, transparansi pelaporan pemerintah daerah kepada masyarakat sangat penting untuk pelayanan keuangan maupun non keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

Konsep transparansi pada mengarah pada suatu kondisi dimana segala aspek penyelenggaraan bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Suatu penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi syarat seperti biaya dan waktu yang dibutuhkan serta cara pelayanan dan pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan diungkap secara terbuka dihadapan publik maka praktik penyelenggaraan pelayanan tersebut terindikasi memiliki tingkat transparansi yang tinggi (Tahir, 2014).

Salah satu faktor pendukung bahwa transparansi penting dilakukan yaitu sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Wilopo, 2017) . Didalamnya dijelaskan bahwa informasi publik harus diumumkan oleh badan publik secara berkala dan informasi

yang diungkapkan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik ini perlu memanfaatkan berbagai media seperti brosur, pengumuman melalui koran, radio, televisi lokal maupun media internet (Dt.Maani, 2009). Semakin mudah masyarakat memperoleh berbagai aspek informasi maka semakin tinggi tingkat transparansi yang dimiliki pemerintah daerah.

2.4 Informasi Publik

Informasi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah keterangan, pernyataan, ide, nilai baik data maupun fakta yang dapat dirasakan lewat pancaindra yang disajikan lewat media teknologi baik elektronik maupun non elektronik melalui berbagai format. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dimiliki, dan diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang kaitannya dengan kepentingan publik. Informasi publik dapat disalurkan lewat media teknologi baik elektronik maupun non elektronik.

Informasi publik disampaikan secara berkala berupa informasi badan publik, kinerja badan publik, laporan keuangan ataupun peraturan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, terdapat informasi wajib diumumkan secara serta merta oleh badan publik. Informasi yang diumumkan yaitu informasi yang mencakup hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi lain seperti informasi yang wajib tersedia setiap saat terdiri dari informasi yang berada dibawah naungan badan publik itu sendiri misalnya hasil kinerja, hasil keputusan dan kerjasama pemerintah daerah. Informasi berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diinformasikan dalam media internet dan website pemerintah juga

merupakan bentuk informasi yang tersedia setiap saat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Setiap pemerintahan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran pemerintah daerah merupakan jumlah asset yang dikuasai oleh pemerintah daerah itu sendiri (Wilopo, 2017). Jumlah asset yang dimiliki pemerintah daerah dipublikasikan melalui website dalam laporan keuangan yang menjadi konsumsi publik untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi masyarakat tentang informasi jumlah asset yang dimiliki pemerintah daerah. Ukuran pemerintah dapat diukur dari total asset yang dimiliki pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Semakin besar total asset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar pula kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan keterbukaan informasi publik karena total asset merupakan cerminan seberapa besar asset yang dimiliki pemerintah sebagai wujud kinerja pemerintahan. Ukuran pemerintah yang besar akan memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat (Saraswati & Rioni, 2019). Menurut Kristanto (2009) ukuran pemerintah juga dapat diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diukur dengan jumlah asset yang dimiliki pemerintah daerah yang tentunya menjadi tolak ukur besar kecilnya sebuah pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah dalam melakukan aktivitas operasional dalam pemerintahan (Sari, 2019). Menurut Adiputra (2018), semakin besar asset yang

dikelola pemerintah daerah maka semakin besar tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah terkait kinerja terbaiknya.

2.6 Jumlah Penduduk

Definisi penduduk sesuai dengan yang terdapat di laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dan terdapat keinginan untuk menetap (www.bps.go.id). Pemberian fasilitas layanan publik mengacu pada seberapa besar jumlah penduduk untuk menetapkan sebuah keputusan perencanaan pendanaan.

Jumlah penduduk di suatu daerah mencerminkan kompleksitas pemerintahan daerah tersebut (Dewi & Adi, 2019). Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam porsi yang besar jika jumlah penduduk besar dan sebaliknya. Jumlah penduduk berbanding lurus dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka semakin besar keharusan penyediaan layanan umum. Selain itu, terdapat faktor lain seperti tuntutan jumlah penduduk yang besar terhadap penyediaan layanan umum.

2.7 Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah atau umur administratif adalah umur suatu pemerintah daerah yang dihitung mulai undang-undang pembentukannya (Setyaningrum & Safitri, 2012). Umur pemerintahan adalah seberapa lama pemerintahan tersebut berdiri. Pemerintah daerah yang memiliki umur lebih lama

dalam artian sudah lama berdiri lebih berpengalaman dan mempunyai informasi cukup banyak yang perlu diungkapkan kepada khalayak umum. Berbeda dengan pemerintah daerah yang masih muda usianya. Pemerintah daerah yang memiliki usia muda kan cenderung kurang berpengalaman dalam mengungkapkan informasi karena belum memiliki “*track record*” sebanyak yang dimiliki pemerintah daerah yang usianya jauh lebih tua.

2.8 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh kepala daerah (Budiarto & Indarti, 2019). Pendidikan tidak lepas dari kunci atau cikal bakal pengetahuan seseorang agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan ilmu yang didapatkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan pengetahuan lebih besar daripada yang lainnya. Orang-orang dibawah seorang pemimpin mempercayai dan memberikan amanah yang besar kepada seorang pemimpin karena pemimpin layak dan lebih pantas mendapatkan sebuah amanah.

Tingkat pendidikan kepala daerah menjadi dasar penilaian bagi masyarakat seberapa jauh kepala daerah memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk menjalankan kinerja pemerintahan. Pengalaman di dunia pendidikan yang cukup lama menjadikan kepala daerah tentunya mampu menjalankan kinerja keuangan maupun non keuangan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini mengambil literatur dari penelitian sebelumnya kemudian dilakukan pengujian. Variabel- variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah (X_1), jumlah penduduk (X_2), umur pemerintah daerah (X_3), dan tingkat pendidikan kepala daerah (X_4) terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah atau kota di Indonesia. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang terlampir dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nainggolan dan Purwanti (2012)	<p>Variabel Denden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan informasi keuangan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah, - Ukuran pemerintah daerah, - Kompleksitas pemerintahan, - Belanja daerah, - Rasio pembiayaan utang, - Tingkat kesejahteraan masyarakat - Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah - Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah - Kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi Keuangan daerah - Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah - Rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah

			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah - Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah
2	Nur Lailatul Khasanah & Shiddiq (2014)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengungkapan LKPD <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umur Pemerintah daerah - Kekayaan daerah (PAD) - Tingkat ketergantungan - Ukuran legislatif - Temuan audit - Total aset - Jumlah SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Umur Pemerintah daerah, kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, ukuran legislatif dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD - Total asset dan Jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD
3	Mya Dewi Trisnawati & Komarudin Achmad (2014)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Laporan keuangan Pemda melalui internet <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetisi politik - Ukuran pemda - Rasio pembiayaan utang - Kekayaan pemda - Tipe pemda - Opini audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet - Ukuran pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet - Rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet - Kekayaan pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet

			<ul style="list-style-type: none"> - Tipe pemda tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet - Opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan Pemda melalui internet
4	Agus Reza Pahlevi & Doddy Setiawan (2017)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pemerintahan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan
5	Wilopo (2017)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi - Akuntabilitas <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio PAD - Ukuran Pemda - Kompleksitas pemerintahan - Belanja daerah - Rasio Pembiayaan utang - Tingkat kesejahteraan masyarakat - Kualitas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah - Rasio PAD, Ukuran Pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan Kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah
6	Naopal, Rahayu, Yudowati (2017)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Pemerintah Daerah - Jumlah Penduduk - Umur pemerintah daerah - Temuan audit - Opini audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD - Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD - Umur Pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

			<p>tingkat pengungkapan LKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD - Opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD
7	Adiputra, Utama, dan Rossieta (2018)	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Size of local Government</i> - <i>Quality of local financial statements</i> - <i>The level of local Government response to regulations</i> - <i>Political environment</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Size of local Government</i> berpengaruh negatif terhadap transparansi - <i>The Level of local Government Response To Regulations</i> berpengaruh negatif terhadap transparansi - <i>Quality of local financial statements</i> berpengaruh positif terhadap transparansi - <i>Political environment</i> berpengaruh positif terhadap transparansi
8	Dekeng S. Budiarto dan Luki Indarti (2019)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan laporan keuangan pemerintah <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usia resmi pemerintah daerah - Total populasi - Ukuran pemerintah daerah - Opini audit - Temuan audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Usia resmi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah - Total populasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Opini audit tidak berpengaruh signifikan

			<p>terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah
9	Harahap LZ & Louise Zalma(2019)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi informasi keuangan <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran pemda - Jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan - Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan
10	Wardani dan Ariani (2022)	<p>Variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Pemda - Kemandirian Daerah - Penerimaan dari pemerintah pusat - ukuran legislative 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Penerimaan dari pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah - Ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

2.12 Hipotesis Penelitian

2.12.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi

Informasi Publik Pemerintah Daerah

Sesuai teori institusional isomorphism, pemerintah daerah mendapatkan tekanan *coercive*. Total asset yang dimiliki suatu pemerintahan menunjukkan seberapa besar asset daerah yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah daerah mendapatkan tekanan *coercive* yaitu semakin besar total asset maka semakin besar tuntutan masyarakat terkait pemanfaatan asset tersebut. Masyarakat menginginkan informasi keuangan maupun non keuangan untuk melihat seberapa transparan pemerintah terkait pemanfaatan asset daerah yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam kepentingan publik.

Semakin besar aset yang dimiliki tentunya semakin baik pelayanan dan pemberian kebermanfaatan dari asset tersebut. Masyarakat mengharapkan pemerintah daerah tidak menggunakan asset yang dimiliki hanya untuk kepentingan pribadi. Banyak pemerintah daerah yang menyelewengkan asset daerah demi kepentingan pribadi, misalnya korupsi. Dengan adanya hal ini, masyarakat mampu menilai seberapa besar pemanfaatan asset daerah untuk kepentingan umum daripada kepentingan pribadi hingga masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat kecurigaan melakukan korupsi atau tidak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nainggolan & Purwati (2012), Wilopo (2017), Naopal et al., (2017), Adiputra et al., (2018), Wardani et al., (2022), memberikan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Trisnawati & Achmad (2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya perbedaan temuan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah

2.12.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi

Publik Pemerintah Daerah

Penduduk merupakan orang menempati wilayah tertentu dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan yang berencana untuk menetap sesuai yang dipaparkan dalam laman online BPS. Di era serba digital, segala aktifitas ataupun pelayanan sudah melibatkan internet karena memudahkan dari segi waktu dan kelengkapan. Masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pemberian pelayanan. Pemerintah membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan dan keterbukaan informasi secara online dengan memanfaatkan jaringan internet.

Dilihat dari sudut pandang teori institusional, pemerintah daerah mencapatakan tekanan *coerchive* yaitu suatu entitas mendapatkan tekanan *coercive* dari pihak luar atau pihak yang lebih tinggi kedudukannnya sebagai bentuk pemenuhan atas hak pihak luar atau eksternal. Pemerintah daerah mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa transparansi informasi dan pelayanan publik dalam rangka menilai kinerja pemerintahan dan kemudahan akses informasi melalui situs

web. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar tekanan yang didapatkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi publik dan pelayanan yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin transparan dengan memanfaatkan media internet.

Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD yang diteliti oleh Naopal et al., (2017). Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak mempengaruhi tingkat keterbukaan atau transparansi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Zalma (2014) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap transparansi informasi keuangan. Dengan adanya temuan tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik Pemerintah Daerah

2.12.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah tersebut berdiri dengan secara resmi ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah yang memiliki umur lebih lama senantiasa lebih berpengalaman pada segala bidang serta memiliki kemampuan dalam proses evaluasi. Kemampuan dalam evaluasi tersebut disebabkan karena banyaknya masalah-masalah yang diperoleh hingga dilakukan perbaikan. Proses evaluasi dan perbaikan tersebut memberikan perbedaan hasil daripada tahun kinerja sebelumnya. Pengalaman

tersebut bisa didapatkan dari proses kinerja pemerintahan meliputi laporan keuangan, pelayanan, kesadaran diri mengungkapkan informasi publik yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Dilihat dari perspektif teori institusional, pemerintah daerah mendapatkan tekanan normatif yang kemudian berpengaruh terhadap kinerja sistem pemerintahan yang mengakibatkan perubahan internal organisasi. Semakin lama umur pemerintah daerah maka semakin banyak tekanan normatif yang dirasakan pemerintah sehingga pemerintah harus meningkatkan tingkat keahlian dalam mewujudkan tingkat transparansi pelaporan informasi publik di situs web. Pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya tekanan normatif yang semakin besar diharapkan mampu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al., (2017) dan Budiarto & Indarti (2019) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa pemerintah telah mewujudkan transparansi pelaporan informasi keuangan. Dengan demikian, semakin tua umur pemerintahan, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap transparansi informasi publik di situs web pemerintah. Dengan adanya temuan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah

2.12.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap

Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah tentunya semua kebijakan ataupun keputusan yang diambil utamanya berasal dari kepala daerah. Perangkat daerah dan masyarakat mengharapkan keputusan terkait permasalahan yang ada dalam suatu pemerintahan merupakan keputusan yang bijak dan dianggap terbaik yang perlu diambil. Pengambilan keputusan terkait pemerintahan bergantung bagaimana kepala daerah menyikapi dan bertindak dengan baik. Menurut Hambrick dan Mason (1984) dalam bukunya menyatakan bahwa tingginya pendidikan yang ditempuh seorang pemimpin memiliki pengaruh positif terhadap inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Inovasi yang semakin besar menjadikan kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dan secara bertahap mengalami peningkatan.

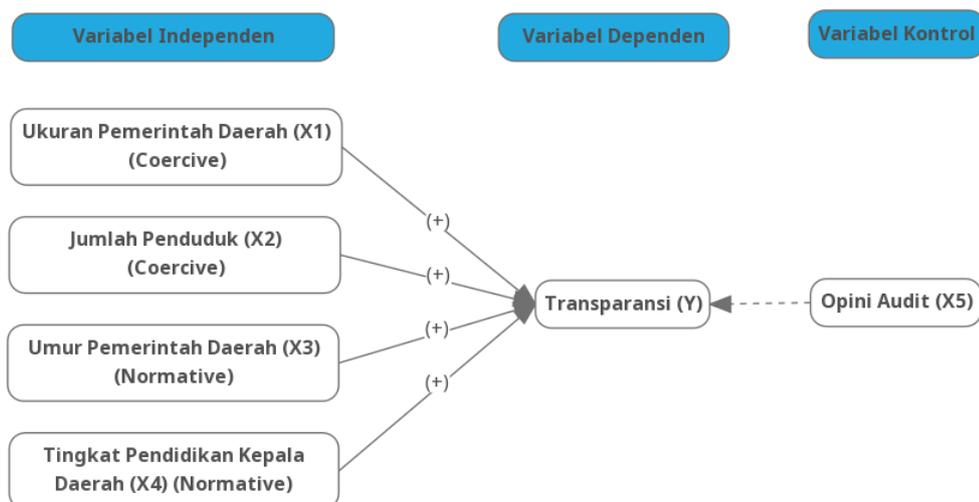
Sesuai teori institusional, tekanan normatif yang telah diberikan umumnya masyarakat kepada kepala daerah menjadi pemicu kepala daerah untuk semakin meningkatkan kinerjanya dengan menjalankan kewajiban dan memberikan pertanggungjawaban. Masyarakat memandang bahwa tingginya pendidikan merupakan seberapa baik kinerja pemerintah daerah meningkatkan semua kebijakan dan keputusan dalam menyelenggarakan pemerintahan bergantung pada keputusan kepala daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah, semakin tinggi

tingkat transparansi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi publik. Dengan adanya penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

2.13 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengaruh dari ukuran pemerintah daerah (X₁), jumlah penduduk (X₂), umur pemerintah daerah (X₃), dan tingkat pendidikan kepala daerah (X₄) terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu opini audit. Tujuan dari penambahan variabel kontrol ini adalah agar menghindari perhitungan bias yang mungkin bisa terjadi akibat faktor lain. Gambaran mengenai kerangka konsep dan hubungan antar variabel dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian (Suliyanto, 2017). Data sekunder berasal dari data yang didapatkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, website pemerintah daerah, dan laman online Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen yang digunakan adalah transparansi informasi publik pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah. Variabel kontrol yang digunakan adalah opini audit.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah generalisasi dari sebuah objek atau subjek penelitian yang memiliki kriteria tertentu (Sugiyono, 2011). Menurut Walpole (2015) populasi adalah sekelompok unsur yang menjadi objek penelitian baik yang terhingga maupun yang tak terhingga. Suatu nilai yang terdapat pada populasi disebut parameter (Mufarrikoh, 2019). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan Pemerintah Daerah/Kota di 34 Provinsi di Indonesia atau setara dengan 514 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia.

3.2.1 Sampel

Sampel merupakan unsur yang diambil dari data populasi kemudian dipilih untuk digunakan dalam penelitian (Hermawan, 2016). Sampel merupakan bagian dari objek penelitian yang dianggap cerminan dari populasi dengan kata lain mewakili populasi (Machali, 2018). Sebuah penelitian memerlukan adanya sampel jika populasi yang tersedia sangat besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti meneliti semua populasi. Pengambilan sampel diperlukan guna menghemat waktu, tenaga, dan biaya (Mufarrikoh, 2019). Jika populasi berjumlah besar, maka mengambil sampel sesuai dengan kriteria penulis. Hal tersebut dilakukan karena penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu sehingga sampel yang didapat lebih spesifik dan *representative* dengan adanya penelitian dibidangnya. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, kriteria dari sampel ini adalah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dipublikasikan di situs web resmi pemerintah daerah masing-masing dan mudah diakses setiap saat. Data dari variabel-variabel yang diteliti oleh penulis tersedia di situs web resmi masing-masing pemerintah daerah.

3.3 Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan populasi penulis yang sangat besar, penulis mengambil sampel dengan kriteria tertentu agar menghemat biaya, waktu, dan tenaga sehingga cakupan penelitian tidak begitu besar dan tentunya menjadi lebih spesifik. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini digunakan jika informasi peluang dari populasi tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan populasi sebesar 514 yang diambil dari jumlah pemerintah daerah di Indonesia. Rumus Slovin diciptakan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{514}{1 + 514(0.1)^2}$$

$$n = 83,71 = 84 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = Jumlah minimal sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah seluruh populasi

e = Error bound yang ditoleransi/persentase kesalahan yang ditoleransi adalah 10%

Penulis mendapatkan sampel sejumlah 107 pemerintah daerah setelah melakukan pencarian data melalui website resmi pemerintah daerah dan laman online Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah minimal sampel berdasarkan Rumus Slovin di atas terpenuhi.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data hasil observasi.

a) Data Sekunder

Menurut Martono (2010), data sekunder adalah data yang telah ada dan disediakan oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga milik pemerintah ataupun swasta. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2021 untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur jumlah penduduk serta variabel tingkat pendidikan kepala daerah yang berasal dari website resmi pemerintah daerah atau kota.

b) Data Hasil Observasi

Data hasil observasi adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melakukan pengamatan dengan pencatatan sistematis dan dengan indikator tertentu. Data hasil observasi yang digunakan dalam penelitian adalah data untuk mengukur variabel dependen yaitu transparansi.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis isi atau tes proyeksi (Sugiono dalam Otok & Retnaningsih, 2016). Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada suatu objek dengan melibatkan pancaindra manusia (Sugiyono, 2016). Pada

saat pelaksanaan proses observasi diperlukan daftar indikator atau skala pengamatan tertentu.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu transparansi informasi publik pemerintah daerah, variabel independen yang diteliti adalah ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah. Terdapat variabel kontrol yaitu opini audit.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah transparansi informasi publik pemerintah daerah. Untuk mengukur variabel ini, penulis menggunakan sistem *scoring* dengan memberikan penilaian sesuai dengan yang dilakukan Adiputra et al., (2018). Jika indikator tidak ditemukan dalam website resmi maka diberi poin 0, sebaliknya jika indikator ditemukan dalam website resmi maka diberi poin 1. Skor final didapatkan dari total poin indikator yang didapatkan. Skor yang didapatkan maksimal 4 point. Indikator pengukuran transparansi dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No	Indikator	Point	Referensi
1	Jika website resmi pemerintah daerah dapat ditemukan di halaman pertama pencarian google dengan mengetikkan nama pemerintah daerah	+1	

2	Hanya tiga klik atau kurang yang diperlukan untuk melihat informasi keuangan dan non keuangan di situs web pemerintah daerah.	+1	Adiputra <i>et al</i> (2018)
3	Jika data keuangan dan non keuangan dapat diunduh dalam berbagai format.	+1	
4	Jika ada informasi keuangan dan non-keuangan di situs web pemerintah.	+1	
Skor minimal 1 dan Skor maksimal 4			

Tabel 3.1 Indikator transparansi.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel-variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016).

3.5.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi transparansi informasi publik pemerintah daerah. Semakin besar jumlah asset yang dimiliki pemerintah maka semakin besar tuntutan dan keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan terkait pengelolaan asset daerah sehingga dapat memicu keterbukaan informasi pemerintah. Variabel ini dijadikan sebagai proksi tersedianya informasi yang disediakan di situs resmi pemerintah. Variabel ini juga mengukur seberapa besar asset yang dimiliki pemerintah sesuai dengan penelitian (Adiputra *et al.*, 2018).

$$\text{SIZE} = \text{Ln Total Aset}$$

Keterangan:

Ln= Logaritma Natural

3.5.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab adanya kebutuhan dalam penyediaan pelayanan publik. Di era serba digital sangat dibutuhkan informasi yang akurat, terpercaya, dan efisien. Pelayanan publik dapat memanfaatkan jaringan internet untuk mengaksesnya. Jumlah penduduk menentukan kebutuhan layanan publik sehingga berpengaruh terhadap transparansi informasi publik dalam website resmi dengan memberikan pelayanan keuangan maupun non keuangan. Keterbukaan informasi dan pelayanan ini perlu diungkapkan kepada masyarakat sehingga menjadi bentuk transparansi pemerintah yang harus ditingkatkan. Pengukuran jumlah penduduk dari penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik.

POPULATION = Ln Jumlah Penduduk

Keterangan:

Ln= Logaritma Natural

3.5.2.3 Umur Pemerintah Daerah

Umur administratif atau umur pemerintah daerah adalah adalah seberapa lama pemerintah daerah tersebut berdiri mulai dari tahun terbentuknya. Pemerintah daerah yang memiliki umur lebih lama cenderung memiliki pengalaman yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi keuangan daerah melalui situs webnya dan

berlaku sebaliknya untuk pemerintah daerah yang masih baru. Pemerintah daerah yang memiliki umur pemerintahan yang masih tergolong baru atau muda cenderung belum memiliki pengalaman atau “*track record*” yang besar sehingga transparansi informasi publik kemungkinan masih sederhana. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung umur pemerintah daerah sejak berdirinya daerah tersebut.

Umur pemerintah daerah didasarkan pada undang-undang pembentukannya. Pengukuran variabel umur pemerintah daerah ini didapatkan dari laman resmi masing-masing pemerintah daerah dengan melihat sejarah pembentukan pemerintahan secara hukum dibentuk sesuai undang-undang. Pengukuran umur pemerintah dimulai sejak terbentuknya undang-undang pembentukan hingga tahun 2022.

3.5.2.4 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat pendidikan kepala daerah adalah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh kepala daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah semakin besar pula transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena kepala daerah yang memiliki wawasan lebih luas menggunakan ilmunya untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan transparansi informasi melalui situs web resmi pemerintah daerah. Pengukuran variabel tingkat pendidikan kepala daerah yaitu dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah pengukuran dengan membedakan indikator satu dengan indikator lainnya yang memperhatikan sebuah tingkatan (Mufarrikoh, 2019). Pengukuran variabel ini menggunakan kriteria-kriteria tertentu pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

No	Indikator	Poin
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
2	Diploma (D3/D4)	2
3	Strata-1	3
4	Strata-2 dan Strata-2 keatas	4

Tabel 3.2 Indikator tingkat pendidikan kepala daerah

3.5.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti yang fungsinya untuk mencegah adanya perhitungan bias sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu opini audit.

Alasan penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai variabel penekan (*suppressor variable*). Awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan. Namun setelah dihadirkan variabel ketiga, maka hubungan antara variabel bebas dan terikat tersebut menjadi tampak. Dengan adanya variabel kontrol sebagai variabel penekan maka dapat mengubah hasil penelitian.

3.5.3.1 Opini Audit

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor untuk menilai kewajaran informasi keuangan pada laporan keuangan suatu instansi atau badan publik. Opini audit tersebut dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai acuan untuk menilai kinerja mereka. Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada lima macam yaitu (1) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); (2) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas; (3) WDP (Wajar Dengan Pengecualian); (4) TP (Tidak Wajar); (5) Tidak Memberikan Pendapat. Pada penelitian ini variabel tersebut akan diukur dengan variabel dummy, dimana poin 1 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP, dan poin 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit selain WTP. Pengukuran variabel opini audit dengan kriteria tertentu disajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Indikator Opini Audit

No	Indikator	Poin
1	Opini Audit WTP	1
2	Opini Audit selain WTP	0

Tabel 3.3 Indikator opini audit.

3.6 Model dan Alat Analisis Penelitian

Model penelitian dalam pengujian hipotesis ini menggunakan model persamaan regresi berganda. Selain itu, data dianalisis menggunakan Statistik

Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik. Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi data seperti mean, median, dan standar deviasi, sedangkan uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi. Setelah model kelayakan regresi diketahui, maka dilanjutkan ke uji analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji signifikansi parsial (T).

3.7 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui mean (ukuran pemusatan data), standar deviasi (ukuran penyebaran data), dan distribusi data (Yamin, 2014). Statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan untuk memperjelas karakteristik data yang dianalisis, tidak untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana gambaran tentang ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah melalui situs web.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya efisien (Yulianingtyas, 2010). Uji asumsi klasik ini menjadi kunci utama apakah penelitian dapat dilanjutkan atau tidak dengan data yang tersedia. Dalam uji asumsi klasik terdapat 3 macam uji yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Penjelasan dari ketiga uji tersebut adalah sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak (Widhiarso, 2017). Alat ujinya menggunakan Histogram, P-Plot, dan untuk memastikan bahwa data telah terdistribusi normal yaitu dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Histogram dan P-Plot hanya berupa grafik yang perlu penafsiran sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu untuk memastikan data telah terdistribusi normal yaitu dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan ketentuan apabila nilai signifikansi ≥ 0.05 maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi ≤ 0.05 maka data tidak terdistribusi normal.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012), uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Cara mengetahuinya yaitu dengan parameter nilai toleransi sebesar 0.10 atau VIF (*Variance Inflation Factor*) diatas 10. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau dibawah 10, maka diantara variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012), uji heterosdastisitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Perbedaan itulah yang disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *glejser* untuk

mengidentifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan parameter tingkat signifikansi ≥ 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari *Scatterplot* yaitu dengan kriteria jika terdapat pola tertentu yang jelas, misalnya titik-titik membentuk pola yang teratur misalnya bergelombang, melebar atau menyempit maka terindikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terindikasi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.9 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian yang memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2016). Uji regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji apakah variabel ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 OP + e$$

Keterangan:

Y = Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah Di SitusWeb

α = Konstanta,

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi variabel dependen,

- X_1 = Ukuran Pemerintah Daerah,
 X_2 = Jumlah Penduduk,
 X_3 = Umur Pemerintahan,
 X_4 = Tingkat Pendidikan Kepala Daerah,
 OP = Opini Audit,
 e = Koefisien error.

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai adjusted *R Square* (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi dapat dilihat di *Model Summary* pada uji regresi. Rentang koefisien determinasi antara 0 hingga 1 yang semakin mendekati angka 1 maka semakin besar variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Sugiyono, 2016).

3.11 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis adalah hasil sementara terhadap rumusan masalah yang belum tentu hasilnya sesuai dengan hasil penelitian dimana hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Maksud dari masih bersifat sementara adalah hasil tersebut belum sesuai dengan fakta-fakta hasil pengumpulan data namun masih berdasarkan teori yang relevan. Untuk itu, penulis melakukan pengujian hipotesis dengan Uji Signifikansi Parsial (T).

3.11.1 Uji Signifikansi Parsial (T)

Uji T digunakan untuk mengetahui dugaan atas hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian yaitu pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Cara pengujian dari uji T adalah dengan melihat nilai signifikansi. Pada penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel transpransi informasi di situs web.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah, pengaruh jumlah penduduk terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah, pengaruh umur pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah, dan pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah di Indonesia. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan ataupun masalah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Data yang disajikan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tersedia di situs web pemerintah masing-masing daerah di Indonesia. Tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator penentu transparansi.

4.1 Analisis Deskriptif

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah dan variabel kontrol yaitu opini audit serta variabel dependen yaitu transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Transparansi (Y)	107	1,00	4,00	2,9252	0,79741
Ukuran Pemerintah (X1)	107	26,27	31,48	28,8644	0,77998
Jumlah Penduduk (X2)	107	11,15	15,06	13,1165	0,92345
Umur Pemerintah Daerah (X3)	107	10,00	99,00	52,5701	23,12522
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4)	107	1,00	4,00	3,4953	0,76939
Opini Audit (X5)	107	0,00	1,00	0,9626	0,19059

Tabel 4.1 Hasil olah data SPSS 27, 2022

Tabel 4.1 memaparkan hasil analisis statistik deskriptif dengan informasi sebagai berikut.

a. Ukuran Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, ukuran pemerintah yang diambil dari total asset diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai minimum 26,27 dan nilai maksimum 31,48 serta nilai rata-rata sebesar 28,8644 dan standar deviasi sebesar 0,77998.

b. Jumlah Penduduk

Dalam uji ini, jumlah penduduk menggunakan total asset diubah menjadi bentuk logaritma natural. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum 11,15 dan nilai maksimal

15,06 serta memiliki nilai rata-rata sebesar 13,1165 dan standar deviasi sebesar 0,92345.

c. Umur Pemerintah Daerah

Dalam uji ini, umur pemerintah daerah menggunakan data nominal dari umur pemerintahan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum 99,00 serta nilai rata-rata sebesar 52,5701 dan standar deviasi sebesar 23,12522.

d. Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Dalam uji ini, tingkat pendidikan kepala daerah menggunakan skala ordinal 1 hingga 4. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel tingkat pendidikan kepala daerah memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00 serta nilai rata-rata sebesar 3,4953 dan standar deviasi sebesar 0,76939.

e. Opini Audit

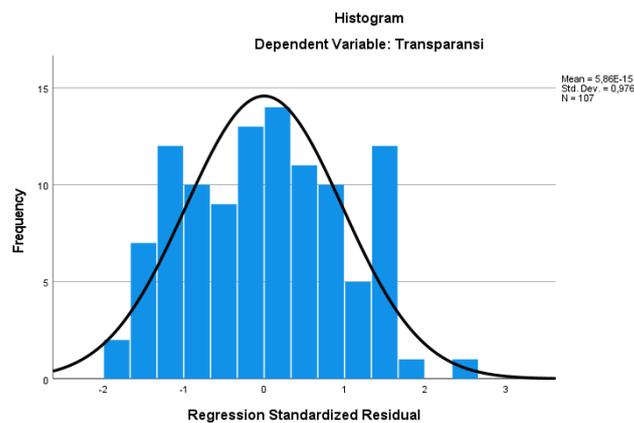
Dalam uji ini, opini audit menggunakan indikator variabel *dummy* yaitu nilai 0 dan 1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui variabel opini audit memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimal 1,00 serta nilai rata-rata sebesar 0,9626 dan standar deviasi sebesar 0,19059.

4.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

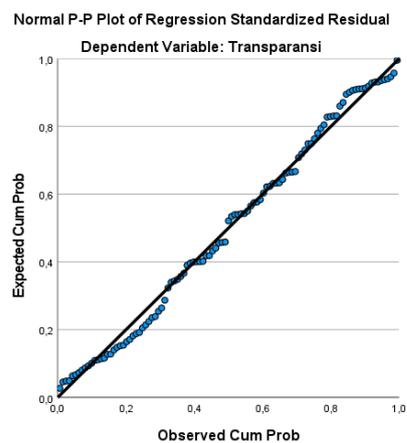
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan data telah valid, konsisten dan tidak bias agar didapatkan data yang normal dan tidak terjadi multikolinearitas maupun heteroskedastisitas pada data penelitian.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang dianalisis telah terdistribusi normal atau tidak. Uji *Komogorov-Smirnov* adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan parameter apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis telah terdistribusi normal. Hasil pengujian uji normalitas menghasilkan grafik sebagai berikut:



Gambar 4.1 Histogram



Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang mengindikasikan bahwa data telah terdistribusi normal. Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa grafik Normal P-Plot terlihat titik-titik mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk memastikan bahwa data telah terdistribusi normal yaitu dengan melakukan Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* ini dilampirkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas (1-Sample Kolmogorov- Smirnov)

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0,68468205
Most extreme Differences	Absolute	0,059
	Positive	0,057
	Negative	-,059
Test Statistik		0.059
Asymp.Sig. (2-tailed) ^c		0.200 ^d

Tabel 4.2 Hasil olah SPSS 27, 2022

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)^c* adalah sebesar 0,200 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang dilampirkan dari uji normalitas adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah telah terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Pengujian pada uji

multikolinieritas mengacu pada nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Syarat tidak terjadi multikolinieritas adalah jika nilai tolerance value > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian ini dilampirkan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Ukuran Pemerintah (X1)	0,675	1,481	Tidak terjadi Multikolinieritas
Jumlah Penduduk (X2)	0,599	1,670	Tidak terjadi Multikolinieritas
Umur Pemerintah Daerah (X3)	0,897	1,115	Tidak terjadi Multikolinieritas
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4)	0,992	1,008	Tidak terjadi Multikolinieritas
Opini Audit (X5)	0,948	1,055	Tidak terjadi Multikolinieritas

Tabel 4.3 Hasil olah data SPSS 27, 2022

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel adalah lebih besar dari 0,1. Variabel ukuran pemerintah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,675; variabel jumlah penduduk memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,599; variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,897; variabel tingkat pendidikan kepala daerah memiliki nilai *tolerance* 0,992; variabel opini audit memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,948. Nilai VIF pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti memiliki nilai VIF < 10 dengan nilai VIF dari ukuran pemerintah sebesar 1,481; nilai VIF dari jumlah penduduk sebesar 1,670;

nilai VIF dari umur pemerintah daerah sebesar 1,115; nilai VIF dari tingkat pendidikan kepala daerah sebesar 1,008; nilai VIF dari opini audit adalah sebesar 1,055. Dari penjelasan nilai Tolerance dan VIF yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan Nilai VIF < 10.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada sebuah model regresi. Jika metode *glejser* pada uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai signifikansi menunjukkan $\leq 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dengan metode *glejser* disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

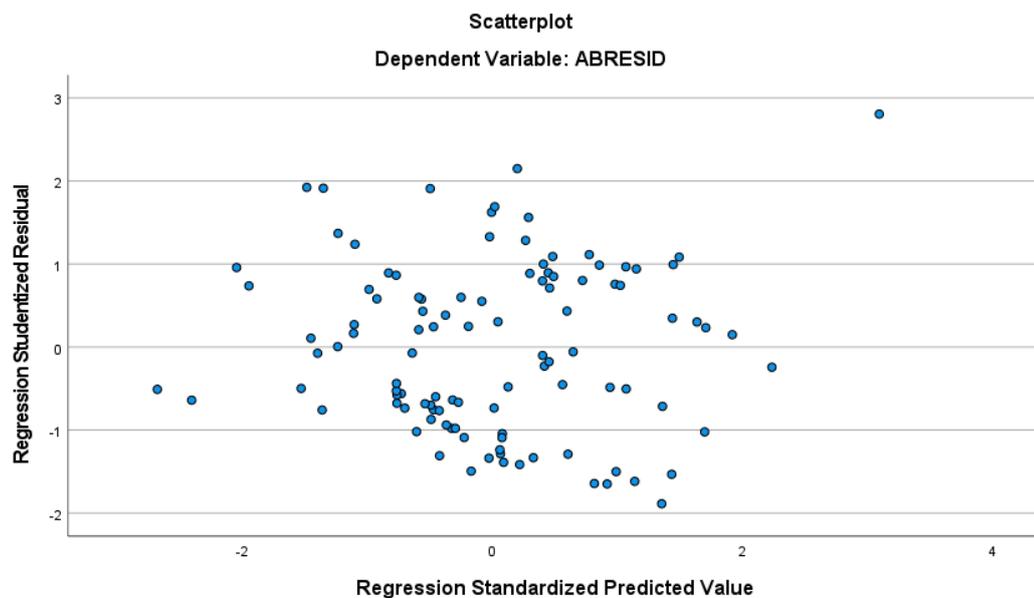
Variabel Penelitian	Sig.
Ukuran Pemerintah (X1)	0,067
Jumlah Penduduk (X2)	0,988
Umur Pemerintah Daerah (X3)	0,111
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4)	0,409
Opini Audit (X5)	0,775

Tabel 4.4 Hasil data SPSS 27, 2022

Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode *glejser* adalah berpacu pada parameter nilai signifikansi $\geq 0,05$. Dari hasil data Tabel 4.4 SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari ukuran pemerintah sebesar 0,067; nilai signifikansi dari jumlah penduduk sebesar 0,988; nilai signifikansi dari umur

pemerintah daerah adalah 0,111; nilai signifikansi dari tingkat pendidikan kepala daerah sebesar 0,409; nilai signifikansi dari opini audit sebesar 0,775. Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *glejser* menunjukkan bahwa semua variabel telah menunjukkan nilai signifikansi $\geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Selain itu, hasil dari uji heteroskedastisitas sebagai bentuk persebaran data dapat dilihat dari Gambar 4.3 Scatterplot berikut ini.



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Dari Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pola titik-titik tidak jelas dan tidak beraturan. Titik-titik tersebut terletak berkisaran di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah serta variabel kontrol yaitu opini audit terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-6,992	2,633	-2,655	0,009
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	0,320	0,106	3,008	0,003
Jumlah Penduduk (X2)	-0,078	0,095	-0,821	0,414
Umur Pemerintah Daerah (X3)	0,004	0,003	1,211	0,229
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4)	0,421	0,089	4,740	0,000
Opini Audit (X5)	0,047	0,367	0,127	0,899

Tabel 4.5 Hasil data SPSS 27, 2022

Model persamaan berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

$$Y = -6,992 + 0,320X_1 - 0,078X_2 + 0,004X_3 + 0,421X_4 + 0,047X_5 + e$$

Berikut interpretasi persamaan regresi linier berganda di atas:

1. Pada persamaan diperoleh nilai konstansta sebesar -6,992 yang berarti variabel transparansi informasi publik pemerintah daerah hasilnya konstan tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar-6,992.
2. Koefisien variabel ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 0,320 yang berarti ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka transparansi informasi publik pemerintah daerah meningkat sebesar 0,320.
3. Koefisien variabel jumlah penduduk adalah sebesar -0,078 yang berarti ketika jumlah penduduk meningkat maka transparansi informasi publik pemerintah daerah menurun sebesar 0,078.
4. Koefisien variabel umur pemerintah daerah adalah sebesar 0,004 yang berarti ketika umur pemerintah daerah meningkat maka transparansi informasi publik pemerintah daerah meningkat sebesar 0,004.
5. Koefisien variabel tingkat pendidikan kepala daerah adalah 0,421 yang berarti ketika tingkat pendidikan kepala daerah meningkat maka transparansi informasi publik pemerintah daerah meningkat sebesar 0,421.
6. Koefisien variabel opini audit adalah sebesar 0,047 yang berarti ketika opini audit meningkat maka transparansi informasi publik pemerintah daerah meningkat sebesar 0,047.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang ada dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji dari uji R^2 dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,513 ^a	0,263	0,226	0,70142

Tabel 4.6 Hasil olah SPSS 27, 2022

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.6, diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,226 atau sebesar 22,6% yang artinya bahwa transparansi informasi publik pemerintah daerah di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 22,6% oleh variabel-variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah dan opini audit sedangkan 77,4% variasi transparansi pelaporan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji T

Uji T dalam penggunaannya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh sebuah variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji T dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi dari variabel independen $\leq 0,05$ maka hipotesis penelitian menunjukkan pengaruh signifikan yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila terjadi keadaan sebaliknya yaitu nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari uji T pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji T

Variabel	Koefisien	T	Sig.
(Constant)	-6,992	-2,655	0,009
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	0,320	3,008	0,003
Jumlah Penduduk (X2)	-0,078	-0,821	0,414
Umur Pemerintah Daerah (X3)	0,004	1,211	0,229
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4)	0,421	4,740	0,000
Opini Audit (X5)	0,047	0,127	0,899

Tabel 4.7 Hasil data SPSS 27, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan hasil dari uji T sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis-hipotesis penelitian.

a. Ukuran Pemerintah Daerah

Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Hasil dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar $0,003 \leq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (X1) berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah (Y).

b. Jumlah Penduduk

Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Hasil dari Tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,414 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk (X2) tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

c. Umur Pemerintah Daerah

Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Hasil dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar $0,229 \geq 0,05$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa Umur Pemerintah Daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah (Y).

d. **Tingkat Pendidikan Kepala Daerah**

Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $\leq 0,05$. Hasil dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (X4) berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah (Y).

4.6 Pembahasan Uji Hipotesis

Hasil dari uji regresi mengenai tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu : Ukuran Pemerintah Daerah (H1), Jumlah Penduduk (H2), Umur Pemerintah Daerah (H3), dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah (H4) menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah sehingga variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah. Pembahasan dari hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Hipotesis Pertama (H1) menguji ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,320 dan nilai signifikansi sebesar $0,003 \leq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap

transparansi informasi publik pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) **didukung.**

Ukuran pemerintah daerah merupakan jumlah asset yang dikuasai oleh pemerintah daerah itu sendiri (Wilopo, 2017). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Total asset menjadi indikator penentu dalam menilai ukuran pemerintah daerah kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan mengungkap informasi ke situs web sehingga merupakan sebuah wujud transparansi pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah diukur dari besar kecilnya asset yang dimiliki pemerintah daerah.

Berkaitan dengan teori institusional, pemerintah daerah mendapatkan tekanan *coercive* dimana semakin besar asset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin besar pula tuntutan masyarakat terkait penggunaan asset yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan besarnya tuntutan dari masyarakat ini justru menjadi tekanan *coercive* pemerintah daerah dalam melakukan transparansi informasi publik berkaitan dengan penggunaan asset yang dimiliki misalnya dalam hal pelayanan informasi publik melalui media digital, pemanfaatan asset untuk keperluan publik, dan acuan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hal tersebut mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transparansi informasi publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap publikasi informasi di internet. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan

penelitian Adiputra (2018), Wilopo (2017), Nainggolan (2016), Wardani (2022), Naopal (2017), Budiarto dan Indarti (2019) yang menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan sebagai wujud transparansi tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah. Harahap dan Zalma (2014) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan.

4.6.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Hipotesis Kedua (H2) menguji jumlah penduduk terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu nilai koefisien regresi sebesar $-0,078$ dan nilai signifikansi sebesar $0,414 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua (H2) **tidak didukung**.

Penduduk menurut laman online Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk segera menetap. Pada dasarnya, semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar layanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini mampu meningkatkan kompleksitas pemerintah untuk terus melakukan pengembangan layanan umum terutama dalam situs web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik yang berarti baik jumlah penduduk kecil maupun besar tidak terdapat dorongan atau tuntutan masyarakat untuk mengungkap transparansi informasi publik di situs web.

Berkaitan dengan teori institusional, pemerintah daerah mendapatkan tekanan *coercive* yang timbul dari pihak eksternal dalam hal ini masyarakat yang menuntut untuk melaksanakan fungsi layanan umum. Fungsi layanan yang dimaksud adalah berkaitan dengan informasi keuangan maupun non keuangan dimana dalam hasil penelitian justru menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi pemerintahan daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Kemungkinan penyebab jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik yaitu dimungkinkan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin besar kompleksitas pemerintahan. Jumlah penduduk yang semakin banyak tentunya mencerminkan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin banyak sehingga menyebabkan pekerjaan pemerintah semakin banyak. Kompleksitas inilah yang menyebabkan pemerintah daerah terhambat dalam melakukan transparansi.

Faktor lain yang mungkin menyebabkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik dimungkinkan karena tingkat pendidikan dari masyarakat yang tergolong rendah. Penduduk yang banyak dengan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Penduduk dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah merasa acuh tak acuh terhadap segala informasi publik yang dianggap tidak penting sehingga tidak banyak tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah terkait transparansi informasi publik.

Selain itu penyebab jumlah penduduk tidak signifikan kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor lain selain tekanan dari jumlah penduduk, seperti tekanan

dari pemerintah pusat, organisasi perangkat daerah, ataupun pihak institusi lain yang kedudukannya lebih tinggi yang memberikan pengaruh besar terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Dengan demikian besar kecilnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi transparansi informasi publik pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal et al (2017) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah tidak transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adi (2019) dan Harahap dan Zalma (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

4.6.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi

Informasi Publik Pemerintah Daerah

Hipotesis Ketiga (H3) menguji umur pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dan nilai signifikansi sebesar $0,229 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H3) **tidak didukung**.

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah berdiri sejak terbentuknya secara hukum dan telah beroperasi secara legal berdasarkan undang-undang. Secara garis besar, pemerintah daerah yang memiliki umur yang

lebih lama cenderung lebih berpengalaman dalam menjalankan kinerja dengan mewujudkan transparansi informasi di hadapan publik. Namun hasil penelitian ini menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah di situs resminya.

Dalam perspektif teori institusional pada gaya normatif yaitu semakin lama umur pemerintah daerah maka semakin besar tekanan normatif yang dirasakan pemerintah sehingga terjadi integrasi dalam penyampaian informasi secara terbuka baik keuangan maupun non keuangan di situs web. Integrasi dalam pelaporan informasi publik di situs web dalam transparansi pelaporan informasi publik tidak menghasilkan hubungan yang positif sehingga umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh umur pemerintah daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah di situs web kemungkinan disebabkan oleh manajemen khususnya pegawai yang tidak melakukan pembaharuan sistem pemerintahan. Para pejabat pemerintahan yang bekerja pada suatu pemerintah daerah yang usia pemerintahannya tergolong tua cenderung hanya melakukan pekerjaan secara berulang-ulang tanpa adanya inovasi ataupun integrasi dalam keterbukaan informasi di situs web. Umur pemerintah daerah yang lebih muda cenderung memiliki personil pegawai yang memiliki kualitas lebih baik dengan kebanyakan usia muda yang kemudian menghasilkan transparansi informasi publik yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang telah lama berdiri.

Hasil yang serupa ditemukan pada penelitian Khasanan dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap

tingkat pengungkapan LKPD yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi transparansi informasi publik. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Budiarto dan Indarti (2019) yang menghasilkan temuan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi pengungkapan laporan keuangan.

4.6.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah

Hipotesis Keempat (H4) menguji tingkat pendidikan kepala daerah terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,421 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H4) **didukung**.

Tingkat pendidikan kepala daerah adalah riwayat pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh kepala daerah. Secara umum, kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi tentunya mampu menjalankan aktivitas-aktivitas dan tindakan berkaitan dengan permasalahan dalam pemerintahan. Semua permasalahan dapat diselesaikan tergantung bagaimana wawasan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki kepala daerah. Kepala daerah yang baik adalah kepala daerah yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan. Dengan dimilikinya wawasan yang luas diharapkan pemerintah mewujudkan tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah. Berikut disajikan persebaran tingkat pendidikan kepala daerah pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah	Tahun 2021	
	n	%
SMA	5	4,6%
Diploma (D3/D4)	3	2,8%
Strata 1	33	30,8%
Strata 2 dan di atasnya	66	61,7%

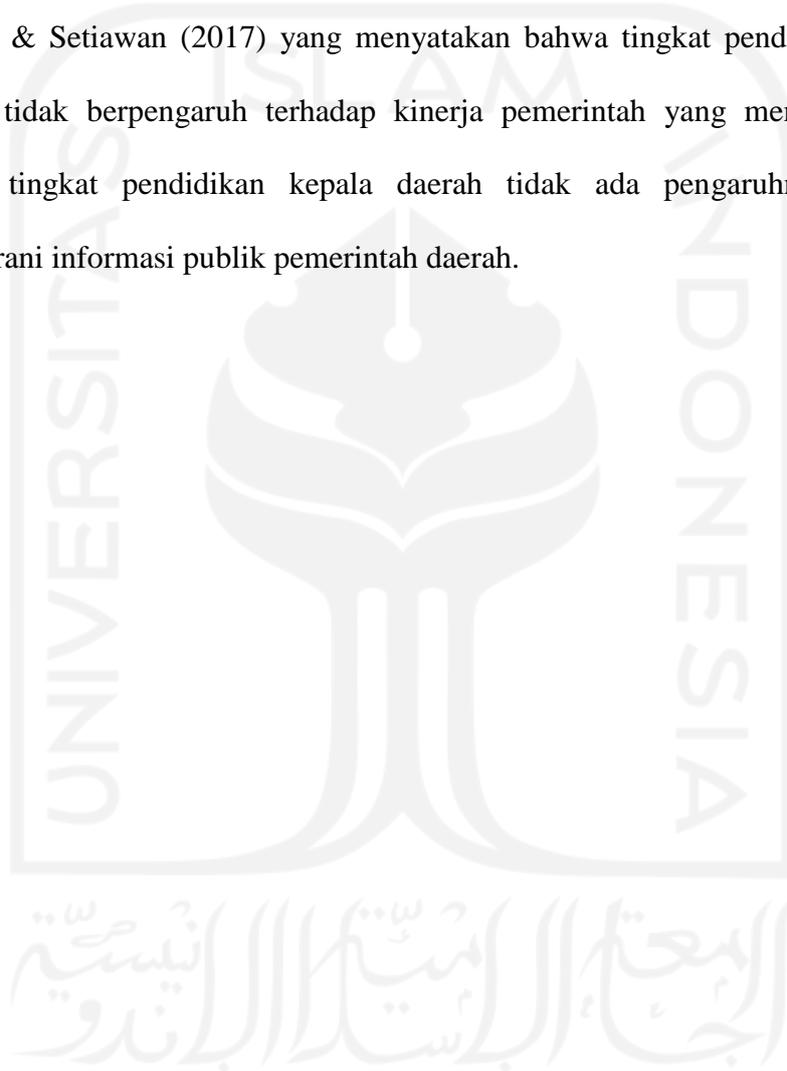
Tabel 4.8 Hasil olah data sekunder 2022

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa kepala daerah dengan pendidikan terakhir SMA mendapatkan persentase sebesar 4,6%, pendidikan terakhir Diploma (D3/D4) sebesar 2,8% sedangkan Strata 1 sebesar 30,8% dan strata 2 dan di atasnya sebesar 61,7%. Dengan demikian, tingkat pendidikan kepala daerah di Indonesia cenderung berada pada tingkat pendidikan Strata 1 dan Strata 2 dan di atasnya. Namun untuk Strata 2 keatas masih jauh lebih dominan daripada Strata 1.

Berdasarkan perspektif teori institusional, kepala daerah mendapatkan tekanan normatif dari pihak internal maupun eksternal berkaitan dengan tingkat pendidikan. Kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan tuntutan dan tekanan yang lebih besar sebagai pihak yang menjalankan amanah dari masyarakat. Pihak internal maupun eksternal khususnya masyarakat memandang kepala daerah yang pendidikannya lebih tinggi tentunya semakin baik tingkat transparansi pemerintah. Jika masyarakat memiliki sudut pandang pemikiran seperti itu, tentu hal tersebut menjadi tekanan bagi kepala daerah. Kepala daerah yang memiliki pendidikan tinggi jika tidak transparan dan tidak bertanggungjawab menunjukkan bahwa kepala daerah tersebut gagal dalam

menjalankan pemerintahan. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Pahlevi & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah yang mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah tidak ada pengaruhnya terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, dan tingkat pendidikan kepala daerah terhadap tingkat transparansi informasi publik pemerintah daerah, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah yang berarti bahwa besar kecilnya jumlah asset yang dimiliki pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk menajalankan kewajiban dengan mengungkapkan keterbukaan informasi keuangan maupun non keuangan di situs resmi pemerintah.
2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah yang berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak menekan pemerintah daerah untuk melakukan transparansi keuangan ataupun pelayanan publik yang diungkapkan di situs web pemerintah.
3. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah yang berarti bahwa pengalaman kinerja dari tahun ke tahun tidak mengalami integrasi dan peningkatan karena cenderung bekerja dalam rangka hanya sebatas pemenuhan kewajiban serta kurang meningkatkan kesadaran keterbukaan informasi.

4. Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi publik pemerintah daerah yang berarti bahwa besar kecilnya wawasan dan pengetahuan dari kepala daerah mendorong pemerintah daerah semakin transparan dalam pelaporan informasi baik keuangan maupun non keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil analisis dan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Berikut ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung oleh penulis dimana ada kemungkinan terjadi kesalahan pengamatan dan proses pencatatan dalam pengumpulan data. Ada kemungkinan jika penelitian dilakukan dengan wawancara ke beberapa pemerintah daerah yang dianggap potensial dalam memberikan informasi, maka besar kemungkinan hasilnya lebih akurat dan objektif.
2. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik untuk mengukur variabel independen yaitu jumlah penduduk adalah belum akurat dan ada beberapa data yang belum merupakan data terbaru.
3. Hasil akhir dari 4 variabel independen yang telah diuji, terdapat dua variabel independen yaitu jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah yang hasilnya bertolak belakang dengan hipotesa awal yang

kemudian hasil penelitian ini perlu adanya pengkajian ulang dalam penelitian berikutnya yang memiliki topik serupa.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Bagi Transparansi Informasi Publik Pemerintah Daerah di Website Resmi

Dengan melakukan penelitian terkait dengan transparansi informasi publik pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat selalu menyediakan data informasi publik dengan berbagai format, tidak hanya dalam bentuk pdf namun dalam bentuk format lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data dalam berbagai format. Selain itu, dalam melaporkan informasi publik di website resmi pemerintah daerah diperlukan sebuah website yang tidak berbelit-belit dalam proses pencarian informasi. Terdapat banyak kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi sehingga dengan modal pengetahuan dan wawasan tinggi diharapkan akan terus menjadi faktor pendorong transparansi informasi publik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian tentang transparansi pemerintah daerah. Penelitian ini akan memberikan informasi tentang referensi literatur dan pedoman untuk penelitian

selanjutnya terutama bagi peneliti yang membahas tentang transparansi informasi publik pemerintah daerah.

3. Bagi masyarakat terkait transparansi informasi publik

Informasi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transparansi informasi publik. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan masyarakat semakin peduli terkait transparansi informasi publik sehingga akan memudahkan masyarakat dalam pencarian informasi yang dibutuhkan.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah/Kota di Indonesia mengenai transparansi pelaporan informasi publik pemerintah daerah di situs web yang menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban sehingga terjadi peningkatan dalam transparansi informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian ini pemerintah diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap transparansi informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di masa mendatang.
2. Ukuran pemerintah daerah dilihat dari seberapa besar total asset yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik tentang bagaimana

pemerintah memanfaatkan asset daerah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan kepala daerah yang terbukti mempengaruhi transparansi informasi publik diharapkan mampu merubah dan memberi inovasi terhadap pemerintahan dan diharapkan setiap pemerintah daerah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi guna melaksanakan transparansi informasi publik yang baik di masa sekarang dan mendatang

3. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambah variabel potensial independen lain, seperti temuan audit, jumlah satuan kerja perangkat daerah, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* dengan mencari penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menentukan variabel baru tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel kontrol yang lain untuk menjadikan penelitian semakin lengkap dan berkualitas. Semakin banyak variabel yang mengontrol penelitian maka akan semakin baik hasil penelitian yang didapatkan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengukur transparansi pemerintah daerah secara umum, melainkan secara lebih khusus pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat bahwa transparansi informasi publik dalam SKPD dan OPD belum banyak diteliti. Dengan adanya penelitian yang baru tersebut, maka akan semakin baik kompleks transparansi dilingkup pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). *Transparency of local government in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research* (2018). 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>.
- Bps.go.id (2022). Kependudukan. Diakses pada 15 November 2022, dari <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.
- Budiarto, D., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19–31.
- Dana, P., Di, D., & Boti, S. (2021). *Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam*. 158. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In *Economics meets sociology in strategic management* (Vol. 17, pp. 143-166). Emerald Group Publishing Limited.
- Dt.Maani, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 47–48.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS20. 6th ed.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of management review*, 9(2), 193-206.
- Harahap, L. Z. (2019). *Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*.
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial*

Behavior, Agency Costs And Ownership Structure I. Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.

- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 1–11.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–370.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).(2008). *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*.
- Loi, K. I., Lei, W. S., & Lourenço, F. (2021). Understanding the reactions of government and gaming concessionaires on COVID-19 through the neo-institutional theory – The case of Macao. *International Journal of Hospitality Management*, 94(June 2020), 102755. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102755>
- Machali, I. (2018). *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia Edisi 2* (Vol. 2). Prenada Media.
- Martono, N. (2010). Analisis isi dan analisis data sekunder. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Mufarrikoh, Z. (2019). *Statistika pendidikan (Konsep sampling dan uji hipotesis)*. Jakad Media Publishing.
- Nainggolan, A., & Purwati, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Full Paper*, 1–26.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2017). *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk*, 7, 56–68.
- Nishitani, K., Unerman, J., & Kokubu, K. (2021). Motivations for voluntary corporate adoption of integrated reporting: A novel context for comparing voluntary disclosure and legitimacy theory. *Journal of Cleaner Production*, 322(March), 129027. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129027>.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003.
- Otok, B., & Retnaningsih, D. (2016). Pengumpulan dan Penyajian Data. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Padeiro, M., Bueno-Larraz, B., & Freitas, Â. (2021). Local governments' use of social media during the COVID-19 pandemic: The case of Portugal. *Government Information Quarterly*, 38(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101620>
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(36), 571–582.
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 29–43. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/view/2559/0>
- Republik Indonesia (2003), Undang-Undang Nomor 17, Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia (2003), Instruksi Presiden Nomor 3, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan e-Government.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 15, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 14, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Republik Indonesia (2012) Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia (2012), Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188-52/1797/SJ, Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Robert G. Eisenhardt, David C. Littman, Chapter 12 Communication impedance: Touchstone for cognitive technology, Editor(s): Barbara Gorayska, Jacob L. Mey, *Advances in Psychology*, North-Holland, Volume 113, 1996, Pages 213-221, ISSN 0166-4115, ISBN 9780444822758, [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(96\)80032-X](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(96)80032-X).
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016641159680032X>)
- Rokhlinasari, S. (n.d.). *Teori- Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan*. 1–11. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Effect of Size of Government Regional Revenue Regional Original and Expenditure Capital of Performance Finance Government Area).

E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(8), 4759.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.
- Sofiana, M., & Kusumadewi, K. A. (2021). Terhadap Pengungkapan Sukarela Internet Financial Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. *Journal of Accounting*, 10, 1–14.
- Struckell, E., Ojha, D., Patel, P. C., & Dhir, A. (2022). Strategic choice in times of stagnant growth and uncertainty: An institutional theory and organizational change perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 182(June), 121839. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121839>.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (F. Zulhendri (ed.)). Penerbit ALFABETA, cv.
- Trisnawati, M., & Achmad, K. (2014). *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*.
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan Kepatuhan Pajak: Perspektif Theory Of Planned Behavior Dan Teori Institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 1(2017), 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>.
- Walpole, R. (2015). *Pengantar Statistika. Terjemahan oleh Bambang Sumantri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, A. K., Ariani, K. R., Surakarta, U. M., & Surakarta, U. M. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Kemandirian Daerah , Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah T. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 1, 575–584.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Widhiarso.(2017). Uji Normalitas. Widhiarso.Staff.Ugm.Ac.Id.

[http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Uji Normalitas.pdf](http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Uji%20Normalitas.pdf).

Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78).

Yamin, S., & Kurniawan, H. (2014). SPSS complete: Teknik analisis statistik terlengkap dengan software SPSS. *Jakarta: Salemba Infotek*.

Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia).

Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. *Annual review of sociology*, 13(1), 443-464.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten dan Kota
1	Kabupaten Aceh Tengah
2	Kabupaten Nagan Raya
3	Kabupaten Pidie
4	Kota Tebing Tinggi
5	Kabupaten Dharmasraya
6	Kota Jambi
7	Kabupaten Rejang Lebong
8	Kabupaten Lampung Tengah
9	Kabupaten Lampung Utara
10	Kabupaten Pesawaran
11	Kabupaten Way Kanan
12	Kabupaten Bandung Barat
13	Kabupaten Ciamis
14	Kabupaten Indramayu
15	Kabupaten Karawang
16	Kabupaten Pangandaran
17	Kabupaten Sumedang
18	Kota Bandung
19	Kota Banjar
20	Kota Bekasi
21	Kota Bogor
22	Kota Cimahi
23	Kota Sukabumi
24	Kabupaten Banjarnegara
25	Kabupaten Banyumas
26	Kabupaten Batang
27	Kabupaten Blora
28	Kabupaten Cilacap
29	Kabupaten Kebumen
30	Kabupaten Klaten
31	Kabupaten Magelang

32	Kabupaten Pati
33	Kabupaten Purbalingga
34	Kabupaten Rembang
35	Kabupaten Sukoharjo
35	Kabupaten Temanggung
37	Kabupaten Wonogiri
38	Kota Magelang
39	Kota Pekalongan
40	Kota Surakarta
41	Kabupaten Gunung Kidul
42	Kabupaten Kulon Progo
43	Kabupaten Sleman
44	Kota Yogyakarta
45	Kabupaten Bondowoso
46	Kabupaten Jember
47	Kabupaten Jombang
48	Kabupaten Mojokerto
49	Kabupaten Nganjuk
50	Kabupaten Pamekasan
51	Kabupaten Pasuruan
52	Kabupaten Ponorogo
53	Kabupaten Sampang
54	Kota Batu
55	Kota Blitar
56	Kota Probolinggo
57	Kota Surabaya
58	Kabupaten Tangerang
59	Kota Tangerang
60	Kota Tangerang Selatan
61	Kabupaten Bangli
62	Kota Denpasar
63	Kabupaten Bima
64	Kabupaten Lombok Barat
65	Kabupaten Lombok Tengah
66	Kabupaten Sumbawa
67	Kota Mataram
68	Kabupaten Flores Timur
69	Kabupaten Sabu Raijua
70	Kabupaten Sikka

71	Kabupaten Sumba Barat
72	Kabupaten Sumba Timur
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan
74	Kota Kupang
75	Kabupaten Kayong Utara
76	Kabupaten Kubu Raya
77	Kabupaten Melawi
78	Kabupaten Sanggau
79	Kabupaten Sekadau
80	Kota Pontianak
81	Kabupaten Barito Selatan
82	Kabupaten Katingan
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara
84	Kota Banjarbaru
85	Kabupaten Berau
86	Kabupaten Kutai Barat
87	Kota Balikpapan
88	Kota Bontang
89	Kabupaten Nunukan
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
92	Kota Bitung
93	Kabupaten Bantaeng
94	Kabupaten Barru
95	Kabupaten Bone
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
97	Kabupaten Sinjai
98	Kabupaten Soppeng
99	Kabupaten Takalar
100	Kabupaten Toraja Utara
101	Kabupaten Wajo
102	Kota Parepare
103	Kabupaten Boalemo
104	Kabupaten Bone Bolango
105	Kabupaten Gorontalo
106	Kota Gorontalo
107	Kabupaten Polewali Mandar

Lampiran 2
Transparansi

No	Kabupaten dan Kota	Indikator				Total poin
		1	2	3	4	
1	Kabupaten Aceh Tengah	√			√	2
2	Kabupaten Nagan Raya	√	√		√	3
3	Kabupaten Pidie	√			√	2
4	Kota Tebing Tinggi	√	√	√	√	4
5	Kabupaten Dharmasraya	√			√	2
6	Kota Jambi	√	√	√	√	4
7	Kabupaten Rejang Lebong	√	√		√	3
8	Kabupaten Lampung Tengah	√			√	2
9	Kabupaten Lampung Utara	√	√		√	3
10	Kabupaten Pesawaran	√	√		√	3
11	Kabupaten Way Kanan	√	√		√	3
12	Kabupaten Bandung Barat	√	√		√	3
13	Kabupaten Ciamis	√	√		√	3
14	Kabupaten Indramayu	√	√		√	3
15	Kabupaten Karawang	√		√	√	3
16	Kabupaten Pangandaran	√				1
17	Kabupaten Sumedang	√	√		√	3
18	Kota Bandung	√	√	√	√	4
19	Kota Banjar	√	√	√	√	4
20	Kota Bekasi	√	√	√	√	4
21	Kota Bogor	√	√	√	√	4
22	Kota Cimahi	√	√	√	√	4
23	Kota Sukabumi	√	√	√	√	4
24	Kabupaten Banjarnegara	√	√		√	3
25	Kabupaten Banyumas	√			√	2

26	Kabupaten Batang	√	√		√	3
27	Kabupaten Blora	√	√		√	3
28	Kabupaten Cilacap	√	√		√	3
29	Kabupaten Kebumen	√			√	2
30	Kabupaten Klaten	√			√	2
31	Kabupaten Magelang	√			√	2
32	Kabupaten Pati	√	√		√	3
33	Kabupaten Purbalingga	√			√	2
34	Kabupaten Rembang	√			√	2
35	Kabupaten Sukoharjo	√	√		√	3
35	Kabupaten Temanggung	√	√		√	3
37	Kabupaten Wonogiri	√	√		√	3
38	Kota Magelang	√	√	√	√	4
39	Kota Pekalongan	√	√	√	√	4
40	Kota Surakarta	√	√	√	√	4
41	Kabupaten Gunung Kidul	√	√		√	3
42	Kabupaten Kulon Progo	√	√		√	3
43	Kabupaten Sleman	√			√	2
44	Kota Yogyakarta	√	√	√	√	4
45	Kabupaten Bondowoso	√	√		√	3
46	Kabupaten Jember	√	√		√	3
47	Kabupaten Jombang	√	√		√	3
48	Kabupaten Mojokerto	√	√		√	3
49	Kabupaten Nganjuk	√	√		√	3
50	Kabupaten Pamekasan	√	√		√	3
51	Kabupaten Pasuruan	√	√		√	3
52	Kabupaten Ponorogo	√	√		√	3
53	Kabupaten Sampang	√			√	2

54	Kota Batu	√	√	√	√	4
55	Kota Blitar	√	√	√	√	4
56	Kota Probolinggo	√	√	√	√	4
57	Kota Surabaya	√	√	√	√	4
58	Kabupaten Tangerang	√		√	√	3
59	Kota Tangerang	√	√	√	√	4
60	Kota Tangerang Selatan	√	√	√	√	4
61	Kabupaten Bangli	√			√	2
62	Kota Denpasar	√	√	√	√	4
63	Kabupaten Bima	√	√		√	3
64	Kabupaten Lombok Barat	√	√		√	3
65	Kabupaten Lombok Tengah	√	√		√	3
66	Kabupaten Sumbawa	√	√		√	3
67	Kota Mataram	√	√	√	√	4
68	Kabupaten Flores Timur	√	√		√	3
69	Kabupaten Sabu Raijua	√			√	2
70	Kabupaten Sikka	√			√	2
71	Kabupaten Sumba Barat	√			√	2
72	Kabupaten Sumba Timur	√	√	√	√	4
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	√		√	√	3
74	Kota Kupang	√	√	√	√	4
75	Kabupaten Kayong Utara	√			√	2
76	Kabupaten Kubu Raya	√			√	2
77	Kabupaten Melawi	√			√	2
78	Kabupaten Sanggau	√			√	2
79	Kabupaten Sekadau	√			√	2
80	Kota Pontianak	√	√	√	√	4
81	Kabupaten Barito Selatan	√			√	2

82	Kabupaten Katingan	√			√	2
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	√			√	2
84	Kota Banjarbaru	√	√	√	√	4
85	Kabupaten Berau	√	√		√	3
86	Kabupaten Kutai Barat	√	√		√	3
87	Kota Balikpapan	√	√	√	√	4
88	Kota Bontang	√	√	√	√	4
89	Kabupaten Nunukan	√			√	2
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	√			√	2
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	√			√	2
92	Kota Bitung	√	√	√	√	4
93	Kabupaten Bantaeng	√	√		√	3
94	Kabupaten Barru	√	√		√	3
95	Kabupaten Bone	√			√	2
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	√			√	2
97	Kabupaten Sinjai	√			√	2
98	Kabupaten Soppeng	√			√	2
99	Kabupaten Takalar	√	√		√	3
100	Kabupaten Toraja Utara	√			√	2
101	Kabupaten Wajo	√	√		√	3
102	Kota Parepare	√	√	√	√	4
103	Kabupaten Boalemo	√			√	2
104	Kabupaten Bone Bolango	√			√	2
105	Kabupaten Gorontalo	√	√		√	3
106	Kota Gorontalo	√	√	√	√	4
107	Kabupaten Polewali Mandar	√			√	2
Total Skor Tiap Indikator		107	68	32	107	

Lampiran 3
Ukuran Pemerintah Daerah

NO	Kabupaten dan Kota	Jumlah Aset	
1	Kabupaten Aceh Tengah	Rp	2.721.367.745.354,87
2	Kabupaten Nagan Raya	Rp	2.223.827.650.148,93
3	Kabupaten Pidie	Rp	3.923.378.673.742,40
4	Kota Tebing Tinggi	Rp	1.951.107.990.212,60
5	Kabupaten Dharmasraya	Rp	2.506.115.489.910,43
6	Kota Jambi	Rp	4.309.925.067.921,55
7	Kabupaten Rejang Lebong	Rp	1.540.281.181.803,65
8	Kabupaten Lampung Tengah	Rp	3.939.857.062.930,29
9	Kabupaten Lampung Utara	Rp	2.264.046.939.532,56
10	Kabupaten Pesawaran	Rp	2.286.051.401.714,79
11	Kabupaten Way Kanan	Rp	2.574.492.469.284,21
12	Kabupaten Bandung Barat	Rp	4.049.068.994.950,04
13	Kabupaten Ciamis	Rp	3.935.252.032.329,36
14	Kabupaten Indramayu	Rp	6.080.489.132.533,75
15	Kabupaten Karawang	Rp	6.301.830.965.643,43
16	Kabupaten Pangandaran	Rp	2.530.471.322.747,87
17	Kabupaten Sumedang	Rp	3.527.810.909.720,77
18	Kota Bandung	Rp	43.728.314.285.726,30
19	Kota Banjar	Rp	1.596.075.644.645,94
20	Kota Bekasi	Rp	15.153.838.224.882,60
21	Kota Bogor	Rp	9.203.864.257.664,83
22	Kota Cimahi	Rp	2.937.388.102.759,22
23	Kota Sukabumi	Rp	1.784.603.926.885,00
24	Kabupaten Banjarnegara	Rp	4.611.184.734.617,03
25	Kabupaten Banyumas	Rp	7.258.283.031.630,04
26	Kabupaten Batang	Rp	3.035.062.150.559,62
27	Kabupaten Blora	Rp	3.536.211.050.648,78
28	Kabupaten Cilacap	Rp	6.345.078.297.174,14
29	Kabupaten Kebumen	Rp	4.678.346.895.120,90
30	Kabupaten Klaten	Rp	3.515.210.592.463,72
31	Kabupaten Magelang	Rp	3.597.390.329.880,28
32	Kabupaten Pati	Rp	6.356.447.372.037,16
33	Kabupaten Purbalingga	Rp	2.857.441.202.742,83
34	Kabupaten Rembang	Rp	2.346.462.043.810,98
35	Kabupaten Sukoharjo	Rp	4.731.746.744.432,34

35	Kabupaten Temanggung	Rp	3.420.435.895.674,96
37	Kabupaten Wonogiri	Rp	3.911.948.544.251,81
38	Kota Magelang	Rp	4.337.393.562.510,68
39	Kota Pekalongan	Rp	3.048.941.837.080,65
40	Kota Surakarta	Rp	12.714.848.249.292,00
41	Kabupaten Gunung Kidul	Rp	3.315.142.296.954,07
42	Kabupaten Kulon Progo	Rp	2.501.713.544.232,27
43	Kabupaten Sleman	Rp	5.820.090.126.338,47
44	Kota Yogyakarta	Rp	4.723.776.065.557,93
45	Kabupaten Bondowoso	Rp	2.890.627.973.795,63
46	Kabupaten Jember	Rp	5.418.306.374.353,02
47	Kabupaten Jombang	Rp	4.179.313.083.806,45
48	Kabupaten Mojokerto	Rp	6.254.447.197.160,66
49	Kabupaten Nganjuk	Rp	3.821.564.127.343,71
50	Kabupaten Pamekasan	Rp	3.778.135.844.076,41
51	Kabupaten Pasuruan	Rp	4.350.293.789.323,61
52	Kabupaten Ponorogo	Rp	2.637.342.783.621,71
53	Kabupaten Sampang	Rp	4.070.969.260.251,76
54	Kota Batu	Rp	1.957.746.217.629,29
55	Kota Blitar	Rp	2.842.396.924.943,55
56	Kota Probolinggo	Rp	1.865.800.687.948,79
57	Kota Surabaya	Rp	47.023.936.026.338,00
58	Kabupaten Tangerang	Rp	17.698.402.172.818,20
59	Kota Tangerang	Rp	15.587.561.926.060,00
60	Kota Tangerang Selatan	Rp	24.194.977.606.820,80
61	Kabupaten Bangli	Rp	1.385.330.610.911,74
62	Kota Denpasar	Rp	256.107.703.526,83
63	Kabupaten Bima	Rp	2.914.151.376.782,91
64	Kabupaten Lombok Barat	Rp	2.929.887.728.968,67
65	Kabupaten Lombok Tengah	Rp	3.557.847.017.990,04
66	Kabupaten Sumbawa	Rp	3.273.666.321.176,15
67	Kota Mataram	Rp	3.499.251.011.186,62
68	Kabupaten Flores Timur	Rp	1.077.911.112.449,41
69	Kabupaten Sabu Raijua	Rp	1.405.899.515.137,28
70	Kabupaten Sikka	Rp	1.869.143.427.841,94
71	Kabupaten Sumba Barat	Rp	1.334.449.394.345,23
72	Kabupaten Sumba Timur	Rp	1.947.382.077.912,35
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	Rp	2.055.358.554.141,74

74	Kota Kupang	Rp	2.780.627.883.470,00
75	Kabupaten Kayong Utara	Rp	1.727.348.740.181,96
76	Kabupaten Kubu Raya	Rp	2.280.319.643.996,93
77	Kabupaten Melawi	Rp	2.445.776.271.917,30
78	Kabupaten Sanggau	Rp	3.256.783.156.042,33
79	Kabupaten Sekadau	Rp	2.133.785.846.273,87
80	Kota Pontianak	Rp	9.280.618.085.253,04
81	Kabupaten Barito Selatan	Rp	2.051.969.920.750,85
82	Kabupaten Katingan	Rp	2.896.210.736.080,58
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp	2.666.240.085.690,18
84	Kota Banjarbaru	Rp	3.083.991.660.626,03
85	Kabupaten Berau	Rp	8.898.911.555.277,56
86	Kabupaten Kutai Barat	Rp	6.101.229.022.796,31
87	Kota Balikpapan	Rp	12.416.371.980.064,30
88	Kota Bontang	Rp	4.699.630.738.534,05
89	Kabupaten Nunukan	Rp	4.628.975.111.427,39
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rp	1.201.464.157.390,54
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Rp	996.339.550.117,19
92	Kota Bitung	Rp	2.040.109.627.098,98
93	Kabupaten Bantaeng	Rp	2.277.319.586.045,34
94	Kabupaten Barru	Rp	2.261.695.402.095,09
95	Kabupaten Bone	Rp	3.153.735.900.889,03
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Rp	1.996.891.614.538,58
97	Kabupaten Sinjai	Rp	2.381.874.408.510,89
98	Kabupaten Soppeng	Rp	2.416.760.677.817,89
99	Kabupaten Takalar	Rp	1.516.088.157.962,55
100	Kabupaten Toraja Utara	Rp	9.081.496.477.446,98
101	Kabupaten Wajo	Rp	3.383.091.587.498,63
102	Kota Parepare	Rp	2.249.324.696.756,63
103	Kabupaten Boalemo	Rp	1.516.685.422.848,62
104	Kabupaten Bone Bolango	Rp	1.553.673.900.918,84
105	Kabupaten Gorontalo	Rp	1.941.333.679.972,39
106	Kota Gorontalo	Rp	1.611.155.785.061,80
107	Kabupaten Polewali Mandar	Rp	2.421.276.774.265,25

Lampiran 4
Jumlah Penduduk

NO	Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk
1	Kabupaten Aceh Tengah	219.744
2	Kabupaten Nagan Raya	168.392
3	Kabupaten Pidie	444.976
4	Kota Tebing Tinggi	162.581
5	Kabupaten Dharmasraya	432.404
6	Kota Jambi	606.200
7	Kabupaten Rejang Lebong	278.793
8	Kabupaten Lampung Tengah	1.271.566
9	Kabupaten Lampung Utara	1.268.234
10	Kabupaten Pesawaran	963.416
11	Kabupaten Way Kanan	953.742
12	Kabupaten Bandung Barat	1.814.226
13	Kabupaten Ciamis	1.229.069
14	Kabupaten Indramayu	1.834.434
15	Kabupaten Karawang	2.370.488
16	Kabupaten Pangandaran	423.670
17	Kabupaten Sumedang	1.142.097
18	Kota Bandung	2.452.943
19	Kota Banjar	203.417
20	Kota Bekasi	2.543.676
21	Kota Bogor	1.052.359
22	Kota Cimahi	571.632
23	Kota Sukabumi	346.325
24	Kabupaten Banjarnegara	1.026.865
25	Kabupaten Banyumas	1.620.918

26	Kabupaten Batang	810.393
27	Kabupaten Blora	886.147
28	Kabupaten Cilacap	1.980.912
29	Kabupaten Kebumen	1.361.913
30	Kabupaten Klaten	1.267.272
31	Kabupaten Magelang	1.305.512
32	Kabupaten Pati	1.324.188
33	Kabupaten Purbalingga	1.007.794
34	Kabupaten Rembang	647.766
35	Kabupaten Sukoharjo	911.603
35	Kabupaten Temanggung	794.403
37	Kabupaten Wonogiri	1.043.177
38	Kota Magelang	121.610
39	Kota Pekalongan	308.310
40	Kota Surakarta	522.728
41	Kabupaten Gunung Kidul	747.161
42	Kabupaten Kulon Progo	436.395
43	Kabupaten Sleman	1.125.804
44	Kota Yogyakarta	373.589
45	Kabupaten Bondowoso	776.151
46	Kabupaten Jember	2.566.682
47	Kabupaten Jombang	1.318.062
48	Kabupaten Mojokerto	1.119.209
49	Kabupaten Nganjuk	1.109.683
50	Kabupaten Pamekasan	854.194
51	Kabupaten Pasuruan	1.615.420
52	Kabupaten Ponorogo	949.318
53	Kabupaten Sampang	919.825

54	Kota Batu	214.653
55	Kota Blitar	158.244
56	Kota Probolinggo	239.444
57	Kota Surabaya	2.908.309
58	Kabupaten Tangerang	3.477.495
59	Kota Tangerang	1.771.092
60	Kota Tangerang Selatan	1.354.350
61	Kabupaten Bangli	228.400
62	Kota Denpasar	962.900
63	Kabupaten Bima	514.105
64	Kabupaten Lombok Barat	704.586
65	Kabupaten Lombok Tengah	1.034.859
66	Kabupaten Sumbawa	457.671
67	Kota Mataram	495.681
68	Kabupaten Flores Timur	257.785
69	Kabupaten Sabu Raijua	94.406
70	Kabupaten Sikka	324.252
71	Kabupaten Sumba Barat	145.097
72	Kabupaten Sumba Timur	252.704
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	465.970
74	Kota Kupang	442.758
75	Kabupaten Kayong Utara	126.571
76	Kabupaten Kubu Raya	570.914
77	Kabupaten Melawi	112.401
78	Kabupaten Sanggau	488.527
79	Kabupaten Sekadau	212.878
80	Kota Pontianak	663.713
81	Kabupaten Barito Selatan	137.270

82	Kabupaten Katingan	169.997
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	226.727
84	Kota Banjarbaru	258.753
85	Kabupaten Berau	210.135
86	Kabupaten Kutai Barat	168.347
87	Kota Balikpapan	645.727
88	Kota Bontang	181.183
89	Kabupaten Nunukan	203.220
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	69.791
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	88.241
92	Kota Bitung	225.134
93	Kabupaten Bantaeng	197.886
94	Kabupaten Barru	185.525
95	Kabupaten Bone	801.775
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	345.775
97	Kabupaten Sinjai	132.032
98	Kabupaten Soppeng	235.157
99	Kabupaten Takalar	295.892
100	Kabupaten Toraja Utara	264.145
101	Kabupaten Wajo	379.079
102	Kota Parepare	145.178
103	Kabupaten Boalemo	145.868
104	Kabupaten Bone Bolango	165.334
105	Kabupaten Gorontalo	397.206
106	Kota Gorontalo	199.767
107	Kabupaten Polewali Mandar	483.920

Lampiran 5
Umur Pemerintah Daerah

No	Kabupaten dan Kota	Umur
1	Kabupaten Aceh Tengah	66
2	Kabupaten Nagan Raya	20
3	Kabupaten Pidie	13
4	Kota Tebing Tinggi	66
5	Kabupaten Dharmasraya	18
6	Kota Jambi	76
7	Kabupaten Rejang Lebong	53
8	Kabupaten Lampung Tengah	23
9	Kabupaten Lampung Utara	63
10	Kabupaten Pesawaran	15
11	Kabupaten Way Kanan	23
12	Kabupaten Bandung Barat	15
13	Kabupaten Ciamis	69
14	Kabupaten Indramayu	69
15	Kabupaten Karawang	69
16	Kabupaten Pangandaran	10
17	Kabupaten Sumedang	69
18	Kota Bandung	33
19	Kota Banjar	27
20	Kota Bekasi	23
21	Kota Bogor	69
22	Kota Cimahi	21
23	Kota Sukabumi	69
24	Kabupaten Banjarnegara	69
25	Kabupaten Banyumas	69
26	Kabupaten Batang	56
27	Kabupaten Blora	72
28	Kabupaten Cilacap	69
29	Kabupaten Kebumen	69
30	Kabupaten Klaten	69
31	Kabupaten Magelang	69
32	Kabupaten Pati	69
33	Kabupaten Purbalingga	69
34	Kabupaten Rembang	69
35	Kabupaten Sukoharjo	69

35	Kabupaten Temanggung	69
37	Kabupaten Wonogiri	69
38	Kota Magelang	72
39	Kota Pekalongan	72
40	Kota Surakarta	69
41	Kabupaten Gunung Kidul	72
42	Kabupaten Kulon Progo	72
43	Kabupaten Sleman	72
44	Kota Yogyakarta	72
45	Kabupaten Bondowoso	72
46	Kabupaten Jember	72
47	Kabupaten Jombang	72
48	Kabupaten Mojokerto	99
49	Kabupaten Nganjuk	72
50	Kabupaten Pamekasan	72
51	Kabupaten Pasuruan	72
52	Kabupaten Ponorogo	72
53	Kabupaten Sampang	72
54	Kota Batu	21
55	Kota Blitar	72
56	Kota Probolinggo	72
57	Kota Surabaya	72
58	Kabupaten Tangerang	79
59	Kota Tangerang	26
60	Kota Tangerang Selatan	11
61	Kabupaten Bangli	64
62	Kota Denpasar	30
63	Kabupaten Bima	64
64	Kabupaten Lombok Barat	64
65	Kabupaten Lombok Tengah	77
66	Kabupaten Sumbawa	66
67	Kota Mataram	29
68	Kabupaten Flores Timur	64
69	Kabupaten Sabu Raijua	14
70	Kabupaten Sikka	64
71	Kabupaten Sumba Barat	64
72	Kabupaten Sumba Timur	64
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	77
74	Kota Kupang	48

75	Kabupaten Kayong Utara	15
76	Kabupaten Kubu Raya	15
77	Kabupaten Melawi	19
78	Kabupaten Sanggau	63
79	Kabupaten Sekadau	19
80	Kota Pontianak	69
81	Kabupaten Barito Selatan	63
82	Kabupaten Katingan	20
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	70
84	Kota Banjarbaru	23
85	Kabupaten Berau	67
86	Kabupaten Kutai Barat	21
87	Kota Balikpapan	63
88	Kota Bontang	23
89	Kabupaten Nunukan	23
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	15
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	14
92	Kota Bitung	32
93	Kabupaten Bantaeng	63
94	Kabupaten Barru	62
95	Kabupaten Bone	20
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	62
97	Kabupaten Sinjai	63
98	Kabupaten Soppeng	58
99	Kabupaten Takalar	58
100	Kabupaten Toraja Utara	14
101	Kabupaten Wajo	58
102	Kota Parepare	58
103	Kabupaten Boalemo	23
104	Kabupaten Bone Bolango	19
105	Kabupaten Gorontalo	63
106	Kota Gorontalo	54
107	Kabupaten Polewali Mandar	63

Lampiran 6
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

No	Kabupaten dan Kota	Tingkat Pendidikan
1	Kabupaten Aceh Tengah	3
2	Kabupaten Nagan Raya	4
3	Kabupaten Pidie	3
4	Kota Tebing Tinggi	4
5	Kabupaten Dharmasraya	3
6	Kota Jambi	4
7	Kabupaten Rejang Lebong	4
8	Kabupaten Lampung Tengah	3
9	Kabupaten Lampung Utara	4
10	Kabupaten Pesawaran	4
11	Kabupaten Way Kanan	4
12	Kabupaten Bandung Barat	3
13	Kabupaten Ciamis	4
14	Kabupaten Indramayu	4
15	Kabupaten Karawang	4
16	Kabupaten Pangandaran	2
17	Kabupaten Sumedang	4
18	Kota Bandung	3
19	Kota Banjar	4
20	Kota Bekasi	4
21	Kota Bogor	4
22	Kota Cimahi	4
23	Kota Sukabumi	4
24	Kabupaten Banjarnegara	4
25	Kabupaten Banyumas	3
26	Kabupaten Batang	4
27	Kabupaten Blora	4
28	Kabupaten Cilacap	4
29	Kabupaten Kebumen	3
30	Kabupaten Klaten	3
31	Kabupaten Magelang	3
32	Kabupaten Pati	4
33	Kabupaten Purbalingga	3
34	Kabupaten Rembang	3
35	Kabupaten Sukoharjo	4

35	Kabupaten Temanggung	3
37	Kabupaten Wonogiri	1
38	Kota Magelang	4
39	Kota Pekalongan	3
40	Kota Surakarta	4
41	Kabupaten Gunung Kidul	2
42	Kabupaten Kulon Progo	3
43	Kabupaten Sleman	3
44	Kota Yogyakarta	4
45	Kabupaten Bondowoso	3
46	Kabupaten Jember	3
47	Kabupaten Jombang	1
48	Kabupaten Mojokerto	4
49	Kabupaten Nganjuk	4
50	Kabupaten Pamekasan	3
51	Kabupaten Pasuruan	4
52	Kabupaten Ponorogo	4
53	Kabupaten Sampang	3
54	Kota Batu	4
55	Kota Blitar	4
56	Kota Probolinggo	4
57	Kota Surabaya	4
58	Kabupaten Tangerang	4
59	Kota Tangerang	4
60	Kota Tangerang Selatan	4
61	Kabupaten Bangli	3
62	Kota Denpasar	4
63	Kabupaten Bima	3
64	Kabupaten Lombok Barat	4
65	Kabupaten Lombok Tengah	3
66	Kabupaten Sumbawa	3
67	Kota Mataram	4
68	Kabupaten Flores Timur	4
69	Kabupaten Sabu Raijua	4
70	Kabupaten Sikka	4
71	Kabupaten Sumba Barat	3
72	Kabupaten Sumba Timur	4
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	4
74	Kota Kupang	4

75	Kabupaten Kayong Utara	3
76	Kabupaten Kubu Raya	4
77	Kabupaten Melawi	2
78	Kabupaten Sanggau	4
79	Kabupaten Sekadau	3
80	Kota Pontianak	4
81	Kabupaten Barito Selatan	1
82	Kabupaten Katingan	1
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	4
84	Kota Banjarbaru	4
85	Kabupaten Berau	3
86	Kabupaten Kutai Barat	3
87	Kota Balikpapan	4
88	Kota Bontang	4
89	Kabupaten Nunukan	1
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	4
92	Kota Bitung	4
93	Kabupaten Bantaeng	4
94	Kabupaten Barru	3
95	Kabupaten Bone	4
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	4
97	Kabupaten Sinjai	4
98	Kabupaten Soppeng	3
99	Kabupaten Takalar	4
100	Kabupaten Toraja Utara	4
101	Kabupaten Wajo	4
102	Kota Parepare	4
103	Kabupaten Boalemo	4
104	Kabupaten Bone Bolango	4
105	Kabupaten Gorontalo	3
106	Kota Gorontalo	4
107	Kabupaten Polewali Mandar	4

Lampiran 7

Opini Audit

NO	Kabupaten dan Kota	Opini Audit
1	Kabupaten Aceh Tengah	1
2	Kabupaten Nagan Raya	1
3	Kabupaten Pidie	1
4	Kota Tebing Tinggi	1
5	Kabupaten Dharmasraya	1
6	Kota Jambi	1
7	Kabupaten Rejang Lebong	1
8	Kabupaten Lampung Tengah	1
9	Kabupaten Lampung Utara	0
10	Kabupaten Pesawaran	1
11	Kabupaten Way Kanan	1
12	Kabupaten Bandung Barat	1
13	Kabupaten Ciamis	1
14	Kabupaten Indramayu	1
15	Kabupaten Karawang	1
16	Kabupaten Pangandaran	1
17	Kabupaten Sumedang	1
18	Kota Bandung	1
19	Kota Banjar	1
20	Kota Bekasi	0
21	Kota Bogor	1
22	Kota Cimahi	1
23	Kota Sukabumi	1
24	Kabupaten Banjarnegara	1
25	Kabupaten Banyumas	1
26	Kabupaten Batang	1
27	Kabupaten Blora	1
28	Kabupaten Cilacap	1
29	Kabupaten Kebumen	1
30	Kabupaten Klaten	1
31	Kabupaten Magelang	1
32	Kabupaten Pati	1
33	Kabupaten Purbalingga	1
34	Kabupaten Rembang	1
35	Kabupaten Sukoharjo	1

35	Kabupaten Temanggung	1
37	Kabupaten Wonogiri	1
38	Kota Magelang	1
39	Kota Pekalongan	1
40	Kota Surakarta	1
41	Kabupaten Gunung Kidul	1
42	Kabupaten Kulon Progo	1
43	Kabupaten Sleman	1
44	Kota Yogyakarta	1
45	Kabupaten Bondowoso	1
46	Kabupaten Jember	0
47	Kabupaten Jombang	1
48	Kabupaten Mojokerto	1
49	Kabupaten Nganjuk	1
50	Kabupaten Pamekasan	1
51	Kabupaten Pasuruan	1
52	Kabupaten Ponorogo	1
53	Kabupaten Sampang	1
54	Kota Batu	1
55	Kota Blitar	1
56	Kota Probolinggo	1
57	Kota Surabaya	1
58	Kabupaten Tangerang	1
59	Kota Tangerang	1
60	Kota Tangerang Selatan	1
61	Kabupaten Bangli	1
62	Kota Denpasar	1
63	Kabupaten Bima	1
64	Kabupaten Lombok Barat	1
65	Kabupaten Lombok Tengah	1
66	Kabupaten Sumbawa	1
67	Kota Mataram	1
68	Kabupaten Flores Timur	1
69	Kabupaten Sabu Raijua	1
70	Kabupaten Sikka	1
71	Kabupaten Sumba Barat	1
72	Kabupaten Sumba Timur	1
73	Kabupaten Timur Tengah Selatan	1
74	Kota Kupang	1

75	Kabupaten Kayong Utara	1
76	Kabupaten Kubu Raya	1
77	Kabupaten Melawi	1
78	Kabupaten Sanggau	1
79	Kabupaten Sekadau	1
80	Kota Pontianak	1
81	Kabupaten Barito Selatan	1
82	Kabupaten Katingan	1
83	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1
84	Kota Banjarbaru	1
85	Kabupaten Berau	1
86	Kabupaten Kutai Barat	1
87	Kota Balikpapan	1
88	Kota Bontang	1
89	Kabupaten Nunukan	1
90	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1
91	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1
92	Kota Bitung	1
93	Kabupaten Bantaeng	1
94	Kabupaten Barru	1
95	Kabupaten Bone	1
96	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0
97	Kabupaten Sinjai	1
98	Kabupaten Soppeng	1
99	Kabupaten Takalar	1
100	Kabupaten Toraja Utara	1
101	Kabupaten Wajo	1
102	Kota Parepare	1
103	Kabupaten Boalemo	1
104	Kabupaten Bone Bolango	1
105	Kabupaten Gorontalo	1
106	Kota Gorontalo	1
107	Kabupaten Polewali Mandar	1

Lampiran 8
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	107	1,00	4,00	2,9252	,79741
Ukuran Pemda	107	26,27	31,48	28,8644	,77998
Jumlah Penduduk	107	11,15	15,06	13,1165	,92345
Umur Pemerintahan	107	10,00	99,00	52,5701	23,12522
Tingkat Pendidikan	107	1,00	4,00	3,4953	,76939
Opini Audit	107	,00	1,00	,9626	,19059
Valid N (listwise)	107				



Lampiran 9

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		107	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,68468205	
Most Extreme Differences	Absolute	,059	
	Positive	,057	
	Negative	-,059	
Test Statistic		,059	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,474	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,461
		Upper Bound	,487

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ukuran Pemda	,675	1,481
	Jumlah Penduduk	,599	1,670
	Umur Pemerintahan	,897	1,115
	Tingkat Pendidikan	,992	1,008
	Opini Audit	,948	1,055

a. Dependent Variable: Transparansi

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,523	1,389		2,537	,013
	Ukuran Pemda	-,104	,056	-,214	-1,851	,067
	Jumlah Penduduk	-,001	,050	-,002	-,015	,988
	Umur Pemerintahan	-,003	,002	-,161	-1,608	,111
	Tingkat Pendidikan	,039	,047	,079	,830	,409
	Opini Audit	,055	,194	,028	,286	,775

a. Dependent Variable: ABRESID

Lampiran 10
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,992	2,633		-2,655	,009
	Ukuran Pemda	,320	,106	,313	3,008	,003
	Jumlah Penduduk	-,078	,095	-,091	-,821	,414
	Umur Pemerintahan	,004	,003	,109	1,211	,229
	Tingkat Pendidikan	,421	,089	,407	4,740	<,001
	Opini Audit	,047	,367	,011	,127	,899

a. Dependent Variable: Transparansi



Lampiran 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,513 ^a	,263	,226	,70142

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Umur Pemerintahan, Tingkat Pendidikan, Ukuran Pemda, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Transparansi



Lampiran 12

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,992	2,633		-2,655	,009
	Ukuran Pemda	,320	,106	,313	3,008	,003
	Jumlah Penduduk	-,078	,095	-,091	-,821	,414
	Umur Pemerintahan	,004	,003	,109	1,211	,229
	Tingkat Pendidikan	,421	,089	,407	4,740	<,001
	Opini Audit	,047	,367	,011	,127	,899

a. Dependent Variable: Transparansi

